



Australian Government

LAPORAN PERKEMBANGAN:

# Memperkuat Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Program BANGGA Papua



**KOMPAK**  
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan  
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia



LAPORAN PERKEMBANGAN:

# Memperkuat Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Program BANGGA Papua

*Penulis*  
Emmy  
Ratna Fitriani

**LAPORAN PERKEMBANGAN:  
Memperkuat Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Program BANGGA Papua**

**Cetakan pertama, Februari 2022**

**ISBN: 978-623-6080-32-0**

**Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**

**© 2022 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)**

**Penulis**

Emmy

Ratna Fitriani

**Editor**

Emmy

Lily Hoo

Philip Hulcome

Ratna Fitriani

**Kontributor**

Arie Agustien (MAHKOTA)

Caroline Tupamahu (BaKTI)

Desy Mutialim (BaKTI)

Dewi Trisnawati Malik (KOMPAK)

Heracles Lang (KOMPAK)

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Publikasi ini silakan disalin dan disebarakan untuk tujuan nonkomersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi [communication@kompak.or.id](mailto:communication@kompak.or.id)  
Publikasi juga tersedia di [www.kompak.or.id](http://www.kompak.or.id)

**Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)**

**Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia**

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta Pusat, 10320

Telepon (021) 8067 5000 | Faksimile (021) 3190 3090

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>v</b>
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	<b>vii</b>
Rekomendasi .....	viii
Manajemen Program .....	viii
Strategi Sosialisasi dan Komunikasi .....	viii
Dampak dan Hambatan terkait Aksesibilitas dan Inklusifitas .....	ix
Dampak dan Hambatan Finansial/ Keuangan .....	ix
Dampak dan Hambatan Kesehatan dan Gizi .....	x
Dampak dan Hambatan terkait Kekerasan Berbasis Gender .....	x
Kelanjutan Program dan Pembiayaan – Risiko Kunci .....	x
<b>Pengantar dan Tujuan</b> .....	<b>1</b>
<b>Latar Belakang</b> .....	<b>5</b>
Gambaran Program BANGGA Papua dan desain awalnya .....	5
Peran Mitra Pembangunan .....	6
Konteks lokal di Provinsi Papua yang berkontribusi pada kebutuhan akan program BANGGA Papua ..	6
Keselarasan BANGGA Papua dengan aturan dan kebijakan daerah .....	7
<b>Metodologi dan Sumber Data</b> .....	<b>9</b>
<b>Temuan dan Diskusi</b> .....	<b>11</b>
Pengelolaan Program .....	11
Keterlibatan Organisasi Perempuan dan Masyarakat .....	11
Peningkatan Kapasitas terkait isu GESI .....	13
Peran Unit GESI dalam Struktur Sekretariat Bersama (Sekber) .....	13
Tidak adanya tim program di tingkat Kampung .....	14
Pengumpulan data anak atau pengasuh/wali dengan disabilitas .....	14
Strategi Sosialisasi dan Komunikasi .....	15
Tujuan dari kegiatan sosialisasi dan komunikasi .....	15
Mengatasi isu beredarnya informasi yang salah dan kebingungan dalam penggunaan dana program .....	16
Penggunaan pesan yang sesuai dengan bahasa, budaya, dan kondisi geografis .....	17
Media komunikasi untuk kelompok dengan kemampuan literasi rendah atau tidak bisa baca tulis .....	17
Lokasi yang paling tepat untuk menjadi saluran informasi .....	18

Dampak dan Hambatan Terkait Aksesibilitas dan Inklusi .....	19
Inklusi keuangan dan informasi terkait layanan perbankan dan hak penerima manfaat.....	19
Hambatan yang disebabkan oleh faktor transportasi dan kurangnya infrastruktur perbankan .....	21
Dampak dan Hambatan Finansial/Keuangan.....	23
Perubahan awal yang didorong oleh pemberian dana melalui rekening atas nama Ibu .....	23
Pembatasan yang tidak direncanakan agar perempuan berbelanja di pasar swalayan yang disediakan .....	23
Kepemilikan uang dan rekening bank mendukung pemberdayaan .....	25
Penggunaan dana program dan memasukan peruntukan dana pada kegiatan yang menghasilkan uang .....	27
Dampak dan Hambatan Kesehatan dan Gizi .....	29
Perubahan pola makan dan asupan gizi yang dilaporkan.....	29
Perubahan perilaku menjaga kesehatan dan potensi meningkatnya angka kehamilan .....	30
Dampak dan Hambatan Terkait Kekerasan Berbasis Gender.....	32
Potensi dampak sampingan terhadap meningkatnya kekerasan berbasis gender (berdasarkan bukti yang sifatnya anekdotal) .....	32
Kelanjutan dan Pembiayaan Program– Risiko Utama .....	34
Meningkatnya kepercayaan dan pemahaman kelompok Orang Asli Papua mengenai program BANGGA Papua.....	34
Persepsi Pemangku Kepentingan mengenai dampak terkait kesetaraan gender dan inklusi sosial/ <i>Gender Equality and Sosial Inclusion (GESI)</i> .....	35
Lampiran A: Pertimbangan aspek Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) pada tahapan berbeda dalam implementasi program .....	36
Lampiran B: Penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) dalam intervensi program .....	37
Lampiran C: Daftar Pustaka .....	39

# Kata Pengantar

BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera, atau Membangun Kesejahteraan Generasi dan Keluarga Papua) adalah program perlindungan sosial dalam bentuk bantuan tunai untuk anak asli Papua berusia hingga empat tahun yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan menggunakan Dana Otonomi Khusus. Hingga Juli 2020, terdapat 23.000 ibu dan wali perempuan yang menerima tunjangan bagi 32.000 anak dari tiga kabupaten percontohan yaitu: Asmat, Paniai dan Lanny Jaya.

Dengan tujuan program untuk meningkatkan status gizi anak-anak asli Papua; merangsang ekonomi mikro dari tingkat kampung hingga kabupaten; dan mengurangi kemiskinan di wilayah sasaran, program ini sarat dengan upaya untuk mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) dengan menempatkan perempuan dan anak-anak Orang Asli Papua sebagai penerima manfaat utama. Hasil berbagai studi dan evaluasi secara global menunjukkan bahwa program bantuan tunai yang ditargetkan untuk perempuan dan anak-anak memiliki potensi yang kuat untuk memberdayakan perempuan antara lain melalui pengurangan kasus kekerasan dalam rumah tangga, peningkatan kekuatan pengambilan keputusan / posisi tawar perempuan dalam keluarga, mengurangi kemiskinan rumah tangga dan tekanan akibat kemiskinan.

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU No. 21/2001) juga mengakui pentingnya upaya mendorong GESI dengan menekankan prinsip-prinsip mendasar GESI untuk mendukung upaya pembangunan di Papua agar dapat memberikan manfaat untuk semua orang Papua, khususnya perempuan dan masyarakat adat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat dalam Dokumen Program BANGGA Papua (2017) dimana prinsip-prinsip GESI secara sistematis dimasukkan sebagai tujuan dalam semua upaya dan intervensi dalam program, mulai dari sosialisasi, pelatihan dan pendampingan teknis, hingga memastikan unsur-unsur GESI tergabung dalam sistem / mekanisme seperti pemantauan dan evaluasi dan sistem informasi manajemen.

Untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip GESI telah diterapkan dalam program BANGGA Papua, KOMPAK telah melakukan analisis GESI terhadap perkembangan implementasi program dengan menggunakan data primer maupun sekunder, termasuk informasi dari hasil wawancara dan diskusi terbatas yang dilakukan di tiga kabupaten percontohan pada Maret 2020. Laporan analisis dan rekomendasi yang dihasilkan dari proses ini berkaitan dan merupakan pelengkap dari laporan evaluasi umum BANGGA Papua yang diterbitkan pada bulan Juni 2020.

Laporan ini dibuat oleh program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) yang merupakan program kerjasama Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan pelayanan dasar dan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan. Laporan ini menyasar pembaca khususnya dari Pemerintah Provinsi Papua, serta pihak pelaksana program BANGGA Papua lainnya yang relevan, bersama dengan pemangku kepentingan dari pemerintah Indonesia di tingkat nasional serta para mitra pembangunan terkait. Diharapkan laporan ini dapat digunakan sebagai pijakan lebih lanjut bagi

berbagai pihak yang ingin mengembangkan dan mereplikasi program perlindungan sosial berbasis konteks lokal yang berpotensi dalam mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam tatanan individu, keluarga, masyarakat dan negara.

Anna Winoto

Tim Leader KOMPAK



# Ringkasan Eksekutif

BANGGA Papua (*Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera*) adalah program perlindungan sosial universal untuk anak, yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Papua dengan menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus). Sampai dengan bulan Juli 2020, tercatat ada 23,000 Ibu dan wali perempuan yang menerima bantuan program untuk 32,000 anak. Meskipun tujuan program adalah untuk meningkatkan asupan gizi anak Orang Asli Papua (OAP), mendorong ekonomi tingkat mikro dari tingkat desa sampai kabupaten, dan mengurangi kemiskinan di wilayah-wilayah sasaran, salah satu fokus utama program ini adalah isu kesetaraan gender dan inklusi sosial/*gender equality and social inclusion* (GESI) dengan menyoar perempuan dan anak sebagai penerima manfaat utama. Berbagai studi dan evaluasi secara gobal (Buller et al., 2018) menunjukkan bahwa program transfer dana tunai yang menyoar perempuan dan anak sangat berpotensi untuk memberdayakan perempuan karena berbagai hal berikut ini, di antaranya adalah mengurangi terjadinya kekerasan domestik, meningkatkan posisi tawar perempuan dalam rumah tangga, dan mengurangi kemiskinan rumah tangga, serta tingkat stress yang disebabkan kemiskinan.

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU no 21/2001) juga menekankan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) untuk mendukung upaya pembangunan di Papua yang akan membawa manfaat untuk semua warga Papua, termasuk di dalamnya perempuan dan OAP. Dokumen program BANGGA Papua (2017) menguraikan bagaimana prinsip-prinsip GESI secara sistematis diterapkan sebagai tujuan dari semua upaya dan intervensi di dalam program, mulai dari sosialisasi, pelatihan dan pendampingan teknis, untuk memastikan aspek GESI dipertimbangkan dalam sistem/mekanisme seperti pemantauan dan evaluasi/*Monitoring & Evaluation* (M&E) dan sistem manajemen informasi/*Management Information Systems* (MIS).

Laporan ini memuat hasil analisa dari implementasi prinsip-prinsip GESI dalam program BANGGA Papua berdasarkan data primer dan sekunder, termasuk wawancara dan diskusi kelompok terarah/*Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan dalam pelaksanaan pilot di tiga Kabupaten di Bulan Maret 2020. Laporan dan rekomendasi di dalamnya dihasilkan dari, serta melengkapi hasil Evaluasi Proses program BANGGA PAPUA yang dilaksanakan di bulan Juni 2020. Laporan ini dibuat oleh program kemitraan pembangunan yang didanai pemerintah Australia, Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK). Laporan ini menyoar pembaca khususnya dari Pemerintah Provinsi Papua, serta pihak pelaksana program BANGGA Papua lainnya yang relevan, bersama dengan pemangku kepentingan dari pemerintah Indonesia di tingkat nasional serta para mitra pembangunan terkait.

Analisa yang dilakukan untuk laporan ini menunjukkan bahwa desain awal dan tujuan program BANGGA Papua sudah sejalan dengan nilai dan prinsip GESI. Berdasarkan umpan balik yang didapatkan, penyaluran/transfer dana tunai (*cash transfer*) yang diberikan kepada perempuan meningkatkan kendali mereka terhadap penggunaannya, dan pada akhirnya dapat membawa perbaikan pada status kesehatan dan nutrisi anak. Meskipun begitu, ditemukan juga bahwa program perlu memitigasi beberapa dampak yang tidak direncanakan yang dapat menimbulkan beban tambahan bagi perempuan. Di samping pengaruh intervensi program yang

signifikan dalam mendekatkan titik-titik pencairan dana kepada kelompok yang membutuhkan, ditemukan bahwa faktor jarak ke lokasi pembayaran/pencairan dana menyebabkan biaya transportasi yang tinggi, bersama dengan ketiadaan sistem pendukung untuk membantu menggantikan peran menjaga/merawat anak juga diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang menghambat perempuan untuk dapat mengakses manfaat program secara maksimal seperti yang diharapkan.

Meskipun hasil studi menunjukkan hasil awal yang positif dari program BANGGA Papua, namun juga ditemukan adanya dampak yang tidak disengaja dari intervensi program. Menjadi sangat penting bagi pemerintah Provinsi Papua dan mitra pembangunan untuk memantau dari dekat perkembangan perubahan ini – baik positif dan negatif - dan menyesuaikan desain serta pesan yang ingin dihasilkan dari program. Dibutuhkan penelusuran mendalam yang dapat menunjukkan risiko yang sebenarnya dari implementasi program serta pemahaman atas potensi dampak negatif yang dapat terjadi jika program dilanjutkan, diperbesar atau diperkecil cakupannya, atau diubah desainnya. Program ini memiliki potensi yang sangat besar, tapi untuk mewujudkannya perlu secara berkelanjutan dikaji dan diperbaiki.

## Rekomendasi

### Manajemen Program

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat, distribusi informasi, dan akuntabilitas dengan memberdayakan atau menggunakan wadah organisasi perempuan dan masyarakat yang ada di tingkat kampung. Hal ini perlu dilakukan di seluruh siklus program, mulai dari tahap awal saat menentukan penerima manfaat, penyaluran bantuan dan penggunaan dana program, serta pemantauan dan evaluasi.
2. Memperluas cakupan kegiatan peningkatan kapasitas terkait isu kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) yang fokus pada kemampuan analisa dan identifikasi masalah. Kegiatan ini perlu menasar baik para pelaksana program dan anggota/tokoh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan program dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan isu-isu terkait GESI
3. Melakukan studi lebih jauh terhadap peran dan efektivitas unit kerja GESI di dalam struktur Sekretariat bersama di Kabupaten Asmat dan Lanny Jaya, khususnya terkait isu sejauh mana program perlu diadopsi di tingkat Provinsi dan Kabupaten Paniai.

### Strategi Sosialisasi dan Komunikasi

4. Perlu mempertimbangkan kebutuhan untuk merevisi materi komunikasi yang menasar penerima manfaat dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memperjelas bahwa transfer dana yang diberikan tidak terikat pada syarat apapun (unconditional), namun tetap mendorong penggunaan dana untuk membeli barang-barang yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan anak dan mengurangi kemiskinan.
5. Memberikan kejelasan mengenai penanggung jawab utama yang ditunjuk untuk penerima manfaat, kepada siapa mereka bisa bertanya, mengklarifikasi persyaratan, dan mengajukan keluhan. Sistem yang ada saat ini terlalu bergantung pada kepala kampung sebagai penampung keluhan atau pemberi informasi. Program perlu bekerjasama dengan kader kampung (Anggota masyarakat yang ditunjuk dan pejabat di tingkat kampung yang membantu pelaksanaan program pemerintah dan non-pemerintah) dan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi lebih banyak penanggung jawab yang dapat memberikan informasi. Sangat penting untuk memastikan penanggung jawab ini mudah untuk diakses, dihormati, dipercaya dan didengar oleh masyarakat.

6. Memastikan materi komunikasi diterjemahkan ke dalam dialek lokal, unsur simbol geografis, kebudayaan, dan religi, serta gambar, dan pesan yang dimuat sesuai untuk wilayah dan kelompok masyarakatnya, serta merupakan media yang paling efektif untuk individu/kelompok yang dituju (contohnya poster, lembar balik/*flipchart*, dan video).
7. Secara berkelanjutan mempromosikan strategi komunikasi yang efektif dalam mendesain pesan untuk penerima manfaat dan pemangku kepentingan yang tidak bisa baca tulis atau kemampuan literasi yang rendah, termasuk memprioritaskan penggunaan media visual di dalam materi komunikasi.
8. Memastikan pesan yang disampaikan untuk perempuan dan kelompok rentan disampaikan melalui wadah/saluran yang dapat secara efektif menjangkau mereka, seperti pusat layanan Kesehatan atau kunjungan rumah.

## Dampak dan Hambatan terkait Aksesibilitas dan Inklusifitas

9. Memastikan penerima manfaat dan pemangku kepentingan lainnya mendapatkan informasi terkini dan akurat mengenai jumlah dana yang akan diterima, penyebab bervariasinya jumlah dana yang diterima di antara penerima manfaat di periode pembayaran berbeda, serta keterbatasan-jika ada-mengenai jumlah yang dapat ditarik oleh penerima manfaat dari akun mereka.
10. Jika memungkinkan, penerima manfaat perlu untuk dapat menyimpan buku tabungannya sendiri. Di wilayah yang tidak memungkinkan untuk ini, akan diperlukan upaya pengamanan dan informasi tambahan untuk memastikan penerima manfaat memiliki akses yang tidak dibatasi ke akun/rekening mereka sendiri.
11. Mengeksplorasi strategi-strategi yang diperlukan untuk meminimalisir hambatan yang muncul dari faktor perjalanan jauh yang harus ditempuh perempuan dan kebutuhan untuk membiayai transportasi serta penitipan anak yang tidak ditanggung oleh program (biaya sendiri). Strategi yang dilakukan dapat bervariasi, mulai dari penyediaan tunjangan transportasi, penyediaan fasilitas transportasi komunal/ dapat digunakan bersama, atau mendorong perempuan untuk tidak membawa anak mereka saat harus melakukan perjalanan ke lokasi pencairan dana (dengan catatan perlu untuk melakukan pengaturan untuk penitipan anak).
12. Memastikan lokasi pendaftaran dan pencairan dana memiliki tempat yang didesain sebagai tempat anak bermain atau beristirahat dengan pengawasan, tempat bagi ibu untuk menyusui atau menjaga anak mereka, serta dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

## Dampak dan Hambatan Finansial/ Keuangan

13. Mengidentifikasi cara-cara yang dapat dilakukan untuk memastikan transfer dana yang dilakukan tidak terikat pada persyaratan tertentu (*unconditional*). Mekanisme yang ada saat ini – terlepas dari maksud baik untuk mengarahkan penggunaan dana pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan program, meningkatkan pengawasan terhadap dana yang diberikan, dan untuk memudahkan penerima manfaat membelanjakan uangnya- sedikit banyak telah mengarah pada transaksi yang terikat pada persyaratan tertentu (*conditional*), memaksa penerima manfaat untuk membeli barang-barang tertentu dengan harga yang lebih tinggi dari toko tertentu.

14. Menjajaki mekanisme-mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengawasi penggunaan dana yang sesuai dengan tujuan program, serta memastikan mekanisme pemberian umpan balik atau adanya strategi yang dilakukan jika ditemukan adanya penggunaan dana dalam jumlah besar/signifikan digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan program. Metode analisa terhadap data bank secara agregat (untuk melindungi privasi) dari penerima manfaat saat ini dan sebelumnya mungkin dapat dilakukan. Penting untuk memastikan transfer dana yang diberikan tidak terikat pada persyaratan tertentu (*unconditional*), serta dapat memberdayakan perempuan. Pemahaman lebih mendalam mengenai tekanan yang dialami perempuan untuk berbagi dalam penggunaan dana, dan bagaimana dana digunakan, akan dapat membantu pengelola program untuk lebih memahami desain yang dibutuhkan dalam kegiatan sosialisasi dan komunikasi.
15. Mengkaji materi komunikasi untuk memastikan kejelasan informasi yang diberikan mengenai penggunaan dana dan untuk jenis barang serta layanan seperti apa. Selain itu, perlu juga untuk memasukkan kegiatan dan inisiatif yang menghasilkan uang/produktif, yang dapat memungkinkan keluarga memenuhi kebutuhan anak dalam jangka waktu panjang (misalnya peternakan yang dikelola keluarga) sebagai contoh praktik baik penggunaan dana yang diharapkan oleh program.

## Dampak dan Hambatan Kesehatan dan Gizi

16. Melanjutkan pemberian layanan Kesehatan di lokasi pencairan dana, agar perempuan dan anak-anak mereka bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan dirujuk ke layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
17. Menjajaki lebih jauh dengan melakukan studi dan analisa terhadap data terkait kondisi kesehatan untuk melihat apakah ada peningkatan jumlah kelahiran, alasannya, serta strategi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir pengaruh yang tidak diinginkan.

## Dampak dan Hambatan terkait Kekerasan Berbasis Gender

18. Menelusuri lebih jauh untuk mengukur seberapa besar skala dan cakupan terjadinya konflik domestik/ rumah tangga dan kekerasan berbasis gender yang dipengaruhi oleh program.
19. Mengantisipasi peningkatan risiko bagi perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dan mengembangkan strategi yang dapat mencegah terjadinya risiko ini.
20. Mempertimbangkan untuk meningkatkan upaya yang menasar kelompok laki-laki dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen mereka dalam memperbaiki gizi anak walaupun mereka tidak menjadi pengelola dana.

## Kelanjutan Program dan Pembiayaan – Risiko Kunci

21. Mengenali risiko-risiko yang mungkin muncul dari peningkatan cakupan atau penutupan program BANGGA Papua. Dampaknya mungkin berkontribusi terhadap berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik jika program dibatalkan atau tidak dilanjutkan setelah kegiatan pilot selesai dilakukan. Jika program akan dilanjutkan setelah pilot selesai, dibutuhkan komitmen jangka panjang untuk pembiayaan, kesesuaian antara prinsip dan pendekatan yang digunakan program, serta hubungan berkelanjutan dengan kelompok-kelompok masyarakat.

# Pengantar dan Tujuan

Laporan ini memuat hasil analisa terhadap implementasi program BANGGA Papua<sup>1</sup> dari perspektif kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI). GESI disini mencakup kelompok penyandang disabilitas, miskin, dan rentan, dinamika antara laki-laki dan perempuan dewasa, dan anak. Implementasi prinsip-prinsip ini dapat dilihat di dalam dokumen program BANGGA Papua (2017), yang secara garis besar menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial secara sistematis diintegrasikan sebagai tujuan dari semua upaya dan intervensi dalam program, mulai dari sosialisasi, pelatihan dan pendampingan teknis, untuk memastikan unsur-unsur GESI dipertimbangkan dan dimasukkan ke dalam sistem/mekanisme yang ada, seperti monitoring evaluasi, dan pengelolaan sistem informasi/*management information systems* (MIS) (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Pendekatan GESI dalam Dokumen Program BANGGA Papua (2017)

## Sosialisasi Program, Pelatihan dan Pendampingan Teknis

PENDEKATAN	KELUARAN/HASIL YANG DIHARAPKAN	KEGIATAN	INDIKATOR	METODE VERIFIKASI	KERANGKA WAKTU <sup>2</sup> [1]
Terhubung dengan semua bagian program/ <i>Cross-cutting</i>	Tokoh Agama, Kepala Suku dan Kepala Kampung menyadari pentingnya mempertimbangkan isu gender, aktif berpartisipasi menjaga terealisasinya manfaat program, dan memastikan program menjangkau penerima manfaat yang disasar, termasuk perempuan usia anak dan dewasa, juga bayi dengan disabilitas.	Mengembangkan instrumen sosialisasi/ pelatihan untuk dimasukkan ke dalam instrumen sosialisasi/ pelatihan program, yang mendalami konsep gender dan pembagian kerjanya dengan tetap mempertimbangkan budaya lokal.	Jumlah instrumen sosialisasi/ pelatihan mengenai GESI.	Kajian terhadap instrumen yang disusun.	Sep 2017
Terhubung dengan semua bagian program/ <i>Cross-cutting</i>	Tokoh Agama, Kepala Suku dan Kepala Kampung menyadari pentingnya mempertimbangkan isu gender, aktif berpartisipasi menjaga terealisasinya manfaat program, dan memastikan program menjangkau penerima manfaat yang disasar, termasuk perempuan usia anak dan dewasa, juga bayi dengan disabilitas.	Melaksanakan sosialisasi/pelatihan dan diseminasi instrumen, sejalan dengan agenda sosialisasi program/ pelatihan	Jumlah pemimpin/ tokoh yang berpartisipasi	Laporan Kegiatan	Okt–Des 2017

<sup>1</sup> *Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera* (BANGGA PAPUA), adalah program perlindungan sosial universal untuk anak yang didesain untuk meningkatkan status kesehatan anak Orang Asli Papua berusia dibawah 4 tahun. Program ini diujicobakan di tiga Kabupaten dan direncanakan untuk diperluas di seluruh Provinsi. Program ini diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan pendampingan teknis dari KOMPAK dan MAHKOTA, dan didanai oleh dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi.

<sup>2</sup> [1] Kerangka Waktu Rencana Aksi GESI sejalan dengan rencana implementasi program (Annex 4).

PENDEKATAN	KELUARAN/HASIL YANG DIHARAPKAN	KEGIATAN	INDIKATOR	METODE VERIFIKASI	KERANGKA WAKTU <sup>2</sup> [1]
Intervensi spesifik GESI	Kepala rumah tangga Laki-Laki menyadari pentingnya mempertimbangkan isu gender, aktif berpartisipasi memastikan program menjangkau penerima manfaat yang disasar, dan dananya digunakan sesuai dengan tujuan program	Melaksanakan kegiatan sosialisasi/ pelatihan untuk laki-laki kepala keluarga sejalan dengan agenda sosialisasi/ pelatihan program	Jumlah peserta laki-laki kepala keluarga yang berpartisipasi	Laporan Kegiatan	Okt–Des 2017
Intervensi spesifik GESI	Perempuan (penerima manfaat) mengetahui keberadaan program dan manfaatnya, dan secara aktif menggunakan manfaat program untuk memastikan Kesehatan anak-anak/ orang lanjut usia yang mereka rawat/wakili.	Melaksanakan kegiatan sosialisasi/ pelatihan secara khusus/terpisah untuk perempuan, khususnya perempuan dengan bayi dan perempuan lanjut usia, mengenai program dan manfaatnya.	Jumlah peserta dan penerima manfaat perempuan	Laporan Kegiatan	Okt–Des 2017

### Sistem dan Instrumen

PENDEKATAN	KELUARAN/HASIL YANG DIHARAPKAN	KEGIATAN	INDIKATOR	METODE VERIFIKASI	KERANGKA WAKTU <sup>3</sup> [1]
Terhubung dengan semua bagian program/ <i>Cross-cutting</i>	Mekanisme pendataan administrasi kependudukan (adminduk) yang memasukkan indikator disabilitas, usia (tanggal lahir) dan jenis kelamin, untuk memastikan keakuratan dari penargetan untuk program perlindungan sosial	Sesi pengantar mengenai konsep gender dan inklusi sosial untuk pemerintah daerah	Jumlah peserta dari pemerintah daerah (laki-laki dan perempuan)	Laporan Kegiatan	Nov 2017– seterusnya
Terhubung dengan semua bagian program/ <i>Cross-cutting</i>	Mekanisme pendataan administrasi kependudukan (adminduk) yang memasukkan indikator disabilitas, usia (tanggal lahir) dan jenis kelamin, untuk memastikan keakuratan dari penargetan untuk program perlindungan sosial	Sesi mengenai bagaimana mengintegrasikan konsep gender dan inklusi sosial ke dalam mekanisme pendataan adminduk, dan bagaimana menggunakan data untuk perencanaan dan penganggaran untuk program perlindungan sosial.	Jumlah pemerintah daerah yang memiliki basis data yang dipersiapkan untuk dapat mengumpulkan informasi terpilah mengenai gender dan kelompok rentan lainnya	Kajian terhadap sistem atau instrumen dari basis data	Nov 2017– seterusnya

<sup>3</sup> [1] Timeline of the GESI Action Plan is in line with the program's implementation plan (Annex 4).

PENDEKATAN	KELUARAN/HASIL YANG DIHARAPKAN	KEGIATAN	INDIKATOR	METODE VERIFIKASI	KERANGKA WAKTU <sup>3</sup> [1]
Terhubung dengan semua bagian program/ <i>Cross-cutting</i>	Pedoman Teknis dan Operasional Program (SOP)/ <i>Panduan Pelaksanaan Program membahas aspek gender dan inklusi sosial</i>	Sesi mengenai bagaimana mengintegrasikan gender dan inklusi sosial ke dalam SOP/ Panduan Pelaksanaan Program	Jumlah pemerintah daerah dengan Pedoman Teknis dan Operasional Program (SOP) yang mengarusutamakan GESI	Kajian terhadap Pedoman Teknis dan Operasional (SOP)/ Panduan pelaksanaan program	Agt–Sep 2017
Terhubung dengan semua bagian program/ <i>Cross-cutting</i>	Aspek terkait Gender dan inklusi sosial diintegrasikan ke dalam sistem monitoring dan evaluasi (M&E) pemerintah daerah.	Sesi mengenai mengapa M&E yang responsif terhadap GESI penting dan relevan.	Jumlah peserta dari pemerintah daerah (Laki-laki dan perempuan).	Laporan Kegiatan	Agt–Sep 2017
Terhubung dengan semua bagian program/ <i>Cross-cutting</i>	Aspek terkait Gender dan inklusi sosial diintegrasikan ke dalam sistem monitoring dan evaluasi (M&E) pemerintah daerah.	Sesi mengenai bagaimana mengintegrasikan aspek GESI ke dalam sistem M&E.	Jumlah pemerintah daerah dengan sistem M&E yang responsif terhadap GESI	Kajian terhadap sistem dan instrumen M&E	Agt–Sep 2017
Terhubung dengan semua bagian program/ <i>Cross-cutting</i>	Aspek terkait Gender dan inklusi sosial diintegrasikan ke dalam sistem manajemen informasi ( <i>Management Information System/MIS</i> ) pemerintah daerah.	Sesi mengenai mengapa Sistem manajemen informasi yang responsif terhadap GESI penting dan relevan.	Jumlah peserta dari pemerintah daerah yang sudah dilatih (Laki-laki dan Perempuan)	Laporan Kegiatan	Agt 2017–Mar 2018
Terhubung dengan semua bagian program/ <i>Cross-cutting</i>	Aspek terkait Gender dan inklusi sosial diintegrasikan ke dalam sistem manajemen informasi ( <i>Management Information System/MIS</i> ) pemerintah daerah.	Sesi mengenai bagaimana mengintegrasikan aspek GESI ke dalam sistem manajemen informasi/ MIS	Jumlah pemerintah daerah dengan sistem manajemen informasi/ MIS yang responsif terhadap GESI	Kajian terhadap sistem atau instrumen untuk manajemen informasi.	Agt 2017–Mar 2018

Laporan ini fokus pada tiga aspek: manajemen program; strategi sosialisasi dan komunikasi; serta dampak program terhadap penerima manfaat, keluarga, dan anggota masyarakat yang lebih luas. Hal ini akan mencakup identifikasi dan analisa terhadap perubahan positif dan negatif, seperti perubahan yang tidak direncanakan.

Laporan ini melengkapi Evaluasi Proses BANGGA Papua (2020), dengan memberikan hasil penelusuran lebih mendalam pada proses dan dinamika dari aspek gender, disabilitas, dan inklusi sosial.

Laporan ini menjawab tiga pertanyaan kunci:

- Se jauh mana desain dan implementasi awal program BANGGA Papua mempertimbangkan isu GESI dan menerapkan perspektif dan pendekatan yang responsif gender dan inklusif?
- Apakah strategi dan implementasi dari kegiatan sosialisasi dan komunikasi BANGGA Papua mempertimbangkan isu-isu GESI, dan apakah sudah sesuai dengan konteks lokal Papua?
- Se jauh mana program ini membawa perubahan bagi kesejahteraan anak dan perempuan Orang Asli Papua (OAP), baik yang direncanakan dan tidak?

Laporan ini dan rekomendasi yang diberikan menyimpulkan dari dan melengkapi hasil Evaluasi Proses BANGGA Papua yang dipublikasikan pada bulan Juni 2020. Evaluasi ini dilakukan oleh Program Kemitraan Pembangunan yang didanai pemerintah Australia, Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK). Laporan ini menyasar khususnya Pemerintah Provinsi Papua dan mitra pelaksana BANGGA Papua terkait lainnya, beserta pemangku kepentingan dari Pemerintah Indonesia di tingkat nasional bersama dengan mitra pembangunannya.

### Kotak 1. Apa itu Program BANGGA Papua?

BANGGA Papua (*Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera*) adalah program perlindungan sosial universal untuk anak, yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Papua dengan menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus)<sup>4</sup>. Sampai dengan bulan Juli 2020, ada 23,000 Ibu dan wali perempuan yang mendapatkan manfaat untuk 32,000 orang anak.

Tujuan program ini adalah:

- (i) Meningkatkan asupan nutrisi anak-anak Orang Asli Papua.
- (ii) Merangsang ekonomi mikro dari tingkat kampung sampai dengan kabupaten.
- (iii) Mengurangi kemiskinan, khusus di daerah-daerah yang disasar.

Meskipun program sudah memiliki tujuan yang jelas, program tidak menerapkan transfer dana bersyarat (*conditional*) dan tidak ada persyaratan tertentu (selain kriteria dasar untuk dapat menjadi penerima manfaat) yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat untuk dapat menerima dana bantuan. Pemerintah Provinsi Papua melihat bantuan dana yang tidak bersyarat (*unconditional*) lebih efektif, efisien, dan mudah diimplementasikan dibandingkan dengan program transfer dana bersyarat (*conditional*). Sejalan dengan pengalaman di seluruh dunia dan juga Indonesia dalam pendekatan 'tambahan uang tunai' (*'cash plus'*), program ini juga bertujuan melengkapi pemberian dana dengan informasi serta layanan kesehatan dan nutrisi pada tingkatan tertentu.

Untuk dapat menjadi penerima program, syaratnya adalah harus Orang Asli Papua, dan berusia di bawah 4 tahun. Hal yang melatar belakangi program secara spesifik menyasar OAP adalah manfaat pembangunan yang rendah yang dirasakan dari inisiatif-inisiatif yang didanai oleh dana Otsus sebelumnya, serta biasanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah perkotaan dan wilayah dengan sumber daya melimpah, dan melewatkan Orang Asli Papua. Program menyasar anak-anak karena upaya ini dilihat dapat melengkapi program '1000 hari pertama' pemerintah Provinsi Papua yang bertujuan mengurangi kekerdilan/*stunting*. Penerima manfaat program mendapatkan Rp 200,000 setiap bulannya, per anak, dan pembayaran direncanakan untuk dilakukan tiga kali dalam setahun ke rekening bank Ibu/wali perempuan.

BANGGA Papua diluncurkan pada tahun 2017 sebagai program percobaan/pilot di tiga Kabupaten (Asmat, Paniai, dan Lanny Jaya). Pemerintah Provinsi Papua memilih untuk fokus pada wilayah kabupaten yang paling miskin dan sulit dijangkau, sehingga pengalaman implementasi di wilayah ini memberikan pembelajaran penting yang akan diperlukan jika program akan diperluas. Jika kegiatan yang dilakukan di wilayah-wilayah pilot ini terbukti berhasil, pemerintah Provinsi Papua pada akhirnya bermaksud untuk memperluas program BANGGA Papua sampai ke 26 kabupaten lainnya yang ada di Provinsi tersebut.

Program ini dilaksanakan di bawah kemitraan pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten-kabupaten yang berpartisipasi. Program ini sendiri secara penuh didanai oleh pemerintah Provinsi Papua, dengan pendampingan teknis yang didanai oleh pemerintah Australia.

*Diadaptasi dari Evaluasi Proses BANGGA Papua/ BANGGA Papua Process Evaluation (Juni 2020)*

<sup>4</sup> Dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah dana khusus untuk otonomi Provinsi Papua, berdasarkan UU No.21 tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Provinsi Papua. Penyediaan dana ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya dan kesejahteraan Orang Asli Papua, serta untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, kota, dan desa.



# Latar Belakang

## Gambaran Program BANGGA Papua dan desain awalnya

BANGGA Papua bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak di bawah usia 4 tahun melalui transfer dana kepada ibu/ wali perempuan dan dilengkapi dengan pemberian informasi mengenai kesehatan dan nutrisi. Perempuan dibantu untuk membuka rekening bank yang kemudian digunakan untuk menerima dana program. Ini merupakan langkah afirmatif yang secara sengaja mempertimbangkan faktor ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan Papua, dan bermaksud mengatasi ini melalui program.

BANGGA Papua telah diujicobakan selama dua tahun (2017–2019) di Kabupaten Paniai, Asmat, dan Lanny Jaya Provinsi Papua. Pertimbangan utama yang digunakan dalam pemilihan kabupaten-kabupaten ini adalah:

- (1) Tingginya angka populasi yang hidup dalam kemiskinan ekstrem/mendalam
- (2) Persentase Orang Asli Papua dari populasi diatas 90% (>90%)
- (3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih rendah dari 50 (<50).
- (4) Potensi dampak yang tinggi terhadap kesejahteraan keluarga dari pemberian bantuan untuk anak

Sebagai tambahan, aspek penting lainnya yang juga dipertimbangkan adalah:

- Akses ke kabupaten
- Ketersediaan layanan/fasilitas umum
- Komitmen pemerintah daerah
- Pengalaman dalam mengimplementasikan program perlindungan sosial lainnya
- Potensi untuk mengintegrasikan program dengan program lain yang relevan atau berkaitan

BANGGA Papua dilahirkan saat dilakukannya kajian dana Otsus oleh KOMPAK pada tahun 2016. Berdasarkan permintaan dari pemerintah Provinsi Papua, KOMPAK dan Program Pembangunan yang didanai pemerintah Australia, Menuju Masyarakat Indonesia yang Kokoh dan Sejahtera (MAHKOTA) dan mitra lokal, memulai proses pengembangan desain program perlindungan sosial yang akan menggunakan dana Otsus untuk dapat lebih mendatangkan manfaat langsung bagi Orang Asli Papua.

BANGGA Papua didesain untuk dapat melengkapi program perlindungan sosial pemerintah yang sudah ada dan menjadi model program yang dapat diadopsi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Model program perlindungan sosial lainnya sudah pernah diujicobakan, seperti Program Nasional PKH Akses (Program Keluarga Harapan Akses).<sup>5</sup> Namun kajian yang dilakukan menunjukkan pendekatan yang digunakan tidak akan efektif atau sesuai dengan konteks Papua.

---

<sup>5</sup> PKH Akses atau *Program Keluarga Harapan Akses* memberikan bantuan sosial dengan pengkondisian secara khusus, bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar di wilayah-wilayah terpencil.

Tantangan yang ditemui dengan model ini adalah: jangkauan yang terbatas dan manfaat yang tidak mencukupi yang disebabkan karena faktor geografis dan tingginya biaya hidup, basis data populasi yang tidak akurat untuk menentukan kelompok sasaran, dan kesulitan dalam mengkategorikan masyarakat ke dalam kelompok miskin dan tidak miskin, yang disebabkan oleh perbedaan dalam memahami kemiskinan di konteks budaya yang berbeda (Bappenas, GIZ, Global Concern Consulting, 2016). Terdapat isu dari sisi penyedia layanan juga, khususnya terkait dengan rekrutmen, pelatihan, dan mempertahankan staf dalam pengelolaan program (ADB, 2018).

Pada awalnya, BANGGA Papua didesain untuk menyasar anak-anak dan orang lanjut usia. Meskipun begitu, saat itu diputuskan untuk memprioritaskan anak-anak OAP yang berusia dibawah 4 tahun, karena ini sejalan dengan prioritas Pemerintah Provinsi Papua yang dicanangkan melalui program Gemas Papua (Generasi Emas Papua). Program ini menargetkan untuk: menghapus/menuntaskan buta aksara, tuntas wajib belajar sembilan tahun, program jaminan 1000 hari pertama kehidupan untuk memastikan layanan kesehatan yang berkualitas dan asupan nutrisi yang baik sejak masa kehamilan sampai dengan dua tahun setelah kelahiran; meningkatkan pencapaian di bidang olahraga dan seni budaya, serta membangun daya saing sumber daya manusia Papua.

## Peran Mitra Pembangunan

Dukungan teknis dalam pengembangan dan implementasi program terutama diberikan oleh program-program kemitraan pembangunan yang didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia/*Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)*:

- **KOMPAK** berperan memperkuat aspek pemerintahan, komunikasi, dan GESI dalam program, termasuk yang dilakukan melalui mitra pelaksananya, BaKTI (*Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia*), sebuah organisasi non-pemerintah di Indonesia.
- **MAHKOTA** berperan memperkuat aspek manajemen dari sisi program perlindungan sosial.

Program KOMPAK dan MAHKOTA bekerja dibawah program kemitraan pembangunan antara, dan dengan pengawasan dari, Pemerintah Australia dan Indonesia. KOMPAK bekerja di tingkat nasional dan daerah untuk membantu memperkuat sistem desentralisasi pemerintah Indonesia, dan sudah lama bekerja memberikan masukan teknis untuk pemerintah provinsi Papua. MAHKOTA bekerja di tingkat nasional untuk memperkuat sistem perlindungan sosial Indonesia. Kedua program berkolaborasi untuk memberikan pendampingan teknis yang berkualitas untuk pemerintah provinsi Papua dalam pengembangan desain dan implementasi BANGGA Papua.

## Konteks lokal di Provinsi Papua yang berkontribusi pada kebutuhan akan program BANGGA Papua

Provinsi Papua memiliki persentase populasi miskin tertinggi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Indonesia, dengan kelompok anak dan lanjut usia sebagai kelompok yang paling rentan. Data menunjukkan terdapat lebih dari 35% anak di Papua hidup dalam kemiskinan (UNICEF, 2017).

Saat program BANGGA Papua diluncurkan tahun 2017, IPM tercatat sebesar 59.1 (Badan Pusat Statistik, 2019). Tingkat kekurangan gizi dan kekerdilan (*stunting*) di Provinsi Papua untuk anak usia 0-59 bulan dilaporkan sebesar 6.8% dan 15.9% secara berurutan: merupakan kedua tertinggi di Indonesia (Kementerian Kesehatan, 2017). Selain itu, Papua memiliki Indeks Pembangunan Gender (IPG) terendah, yaitu hanya mencapai 79.4 di tahun 2017, dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 91.0 (Badan Pusat Statistik, 2020).

## Keselarasan BANGGA Papua dengan aturan dan kebijakan daerah

Sebagai program perlindungan sosial, konsep BANGGA Papua sejalan dengan tujuan dari alokasi dana Otsus. Program bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak Orang Asli Papua, berdasarkan UU No. 21 tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Provinsi Papua. Undang-Undang ini didasari oleh prinsip mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan sumber daya Provinsi Papua untuk meningkatkan standar hidup Orang Asli Papua, sebagai kelompok masyarakat yang masih mengalami kesenjangan dibandingkan dengan masyarakat di provinsi lain di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan prinsip inklusi sosial dengan mengidentifikasi Orang Asli Papua sebagai prioritas dalam upaya pembangunan di Papua melalui implementasi Undang-Undang ini. UU ini juga mencantumkan prinsip GESI<sup>6</sup>:

*'Untuk Menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memosisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki.'*

Secara umum, semua peraturan dan kebijakan pemerintah Indonesia (tingkat nasional dan provinsi) (lihat tabel 2 di bawah) mencerminkan dukungan terhadap prinsip keperpihkan terhadap kepentingan masyarakat asli Papua, khususnya kelompok anak yang menjadi sasaran program, juga berupaya untuk mengakomodir kebutuhan khusus dari kelompok masyarakat ini.

Dalam Panduan Teknis Operasional (PTO) Program, secara eksplisit dituliskan bahwa kesetaraan dan keadilan gender menjadi prinsip dasar, terutama dalam pengambilan keputusan dan perolehan manfaat program. Peninjauan lebih jauh terhadap dokumen PTO dan implementasinya juga menunjukkan bahwa prinsip dan pendekatan ini sudah diperhitungkan sejak tahapan desain program, dengan perencanaan yang jelas mengenai bagaimana memasukkan aspek kesetaraan gender dan inklusi sosial di berbagai tahapan dari implementasi program, termasuk sosialisasi program, pelatihan dan pendampingan teknis, pemantauan dan evaluasi, serta sistem manajemen informasi.

<sup>6</sup> UU No. 21 tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, Pasal 47, Bab XII: Hak Asasi Manusia.

Tabel 2. **Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia yang relevan dengan prinsip keberpihakan terhadap kepentingan Orang Asli Papua**

<p><b>Peraturan</b></p>	<p>Peraturan Gubernur No 23 tahun 2018 mengenai Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera.</p> <p>Keputusan Gubernur No 188.4/342 tahun 2018 mengenai pembentukan tim dan Sekretariat bersama (Sekber) untuk Program perlindungan sosial BANGGA Papua.<sup>7</sup></p> <p>Keputusan Bupati mengenai Pembentukan Sekretariat Bersama untuk Implementasi Program Perlindungan Sosial BANGGA Papua (Asmat, Paniai, dan Lanny Jaya)</p> <p>Keputusan Gubernur mengenai calon penerima manfaat Program BANGGA Papua (Asmat, Paniai, dan Lanny Jaya).</p> <p>Undang-Undang No 21 tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Provinsi Papua</p>
<p><b>Kebijakan Manajemen Program</b></p>	<p>Dokumen Program BANGGA Papua (2017).</p> <p>Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program BANGGA Papua (versi draf terbaru).</p> <p>Kesepakatan bersama antara Provinsi Papua dan Kabupaten di bawahnya mengenai implementasi program BANGGA Papua di tiga kabupaten pertama.</p>

<sup>7</sup> Revisi belum final

# Metodologi dan Sumber Data

Studi ini menggunakan kombinasi informasi dari sumber data primer dan sekunder.

Data primer dikumpulkan sebagai bagian dari Evaluasi Proses BANGGA Papua (2020), yang dilakukan secara kolaboratif oleh MAHKOTA, BaKTI, dan KOMPAK.

Pengambilan data dilakukan di 17 desa di 3 Kabupaten pilot dari tanggal 8 sampai dengan 13 Maret 2020. Pengambilan data ini mencakup 13 diskusi kelompok terarah/*focus group discussions* (FGDs) dan 31 wawancara mendalam, dengan 131 responden (termasuk 104 perempuan). Detil lebih jauh dapat dilihat pada lampiran.

- FGD dilakukan terhadap tokoh masyarakat, penerima manfaat dan non-penerima manfaat. Kelompok yang bukan penerima manfaat termasuk para ibu yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar sebagai penerima manfaat program.
- Wawancara mendalam dilakukan dengan kader kampung/petugas kesehatan, penerima manfaat, anggota Sekretariat Bersama, non-penerima manfaat, dan penerima manfaat yang tidak aktif. Penerima manfaat yang tidak aktif disini adalah mereka yang tidak menarik dana sejak pencairan dana program yang pertama.

Data sekunder meliputi penelusuran terhadap aspek GESI terhadap:

- Dokumen desain program awal
- Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program
- Laporan Pemantauan Program
- Laporan kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan tim BaKTI
- Evaluasi Proses Program BANGGA Papua yang dilakukan secara kolaboratif antara MAHKOTA dan KOMPAK.
- Analisa tim studi MAHKOTA terhadap informasi yang dikumpulkan dari masyarakat di tiga kabupaten pilot (Asmat, Paniai, dan Lanny Jaya).
- Laporan lain yang ditulis oleh konsultan KOMPAK dengan spesialisasi di isu pemerintahan (*Governance Specialist*) sebagai bagian dari evaluasi proses BANGGA Papua.

Terdapat dua hambatan utama dalam kegiatan pengambilan data dan analisa untuk penulisan laporan ini. Yang pertama, data yang digunakan dalam laporan ini diambil dalam evaluasi proses sebelumnya dan tidak secara spesifik mempertimbangkan kebutuhan untuk analisa GESI. Penulis tidak secara langsung terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan evaluasi, sehingga ada keterbatasan dalam keluasan dan kedalaman data yang terkumpul, khususnya yang terkait dengan isu-isu GESI. Kedua, meningkatnya kasus COVID-19

juga menjadi hambatan bagi penulis untuk dapat menindaklanjuti pemahaman dan masukan yang didapatkan dari penerima manfaat dan responden lain yang diwawancarai untuk dapat lebih baik memahami isu atau perubahan yang terlihat.

Studi lebih jauh mungkin diperlukan untuk dapat lebih memberikan konteks dan mendalami temuan awal yang ada dalam laporan GESI ini serta evaluasi proses yang sudah dilakukan.

# Temuan dan Diskusi

## Pengelolaan Program

### Keterlibatan Organisasi Perempuan dan Masyarakat



**REKOMENDASI:** Meningkatkan partisipasi masyarakat, distribusi informasi, dan akuntabilitas dengan memberdayakan atau menggunakan organisasi perempuan dan masyarakat yang sudah ada di tingkat kampung. Upaya ini perlu dilakukan di seluruh tahapan program, mulai dari tahapan awal menentukan penerima manfaat, pencairan dan penggunaan dana program, serta pemantauan dan evaluasi.

Organisasi perempuan dan masyarakat memiliki peran penting untuk membantu memperluas pengelolaan program dengan cara yang lebih dapat diakses oleh masyarakat. Sementara pembentukan Sekretariat Bersama Kabupaten, termasuk keberadaan perwakilan dari berbagai sektor dan kampung, merupakan langkah penting dan telah dikaitkan dengan keterlibatan yang positif, keberadaan lebih banyak organisasi lokal akan membantu meningkatkan keinklusiannya jika ada mekanisme untuk memastikan akuntabilitas ke atas dan ke bawah, juga pelaporan yang efektif.



Gambar 1: BANGGA Papua melibatkan bidan, kader posyandu, dan petugas Kesehatan di Puskesmas untuk mensosialisasikan program dan mengadvokasi penerima manfaat untuk menggunakan dana program dengan tepat. (Lokasi: Enarotali, Paniai. Fotografer: Desy Mutialim.)

Posyandu adalah pusat layanan terpadu kesehatan dan gizi yang bertujuan memberikan layanan kesehatan dasar, seperti perencanaan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta gizi.

Hasil kajian terhadap dokumen-dokumen program dan data wawancara menunjukkan bahwa proses penentuan penerima manfaat sangat bergantung pada kepala kampung, yang bertanggung jawab untuk melakukan seluruh proses verifikasi, validasi data, dan konfirmasi ke Sekber (ketika ditemukan data tidak sesuai atau tidak akurat). Mekanisme ini tidak hanya menyebabkan kepala kampung memiliki beban kerja yang sangat tinggi, tapi juga mengurangi akses dan partisipasi masyarakat kampung dalam penentuan penerima manfaat.

KOMPAK dan MAHKOTA awalnya merekomendasikan keberadaan 'Komite Kampung' untuk mengatasi masalah ini; namun Sekber kemudian memutuskan bahwa implikasi biaya dan peraturan menyebabkan pendekatan ini tidak memungkinkan untuk dijalankan.



*(P) Berarti mama daftar BANGGA Papua ini sendiri? Mendaftar sendiri atau lewat bapak kampung?*

*(R) Bapak kampung.*

*(P) Oh, tapi harus urus akta dulu ya?*

*(R) Iya. Dia punya nama anak-anak kasih masuk di KK (Kartu Keluarga) dulu.*

*(P) Kalau sudah lengkap semua baru ke Bapak Kampung?*

*(R) Iya.*

**FGD dengan penerima manfaat, Asmat.**

Penyebaran informasi dari Sekber kepada masyarakat kampung juga sangat bergantung pada inisiatif kepala kampung dan staf pemerintahan kampung. Akibatnya, informasi penting seperti yang terkait dengan jadwal pencairan dana seringkali didapatkan masyarakat secara sporadis- misalnya dari 'mulut ke mulut' atau obrolan warga kampung yang kebetulan terdengar oleh yang lain. Meskipun cara tradisional ini dapat dilihat sebagai cara yang umum digunakan untuk menyebarkan informasi di tingkat komunitas, tapi hal ini juga merefleksikan kebutuhan akan saluran penyebaran informasi ke masyarakat yang lebih beragam dan bervariasi.



*(P) Kalau pencairan sendiri itu informasinya dari mana? Jadwal pencairan awalnya?*

*(R) Kalau pencairan, biasa orang menghebohkan, cerita dari mulut ke mulut. Orang cerita dari kelompok-kelompok dia cerita.*

**FGD dengan tokoh masyarakat, Asmat.**

Didapatkan juga kesan bahwa mekanisme penampungan keluhan menjadi satu-satunya saluran yang disediakan program untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan memengaruhi pelaksanaan program. Meskipun program sudah merencanakan untuk membangun sistem penampungan keluhan masyarakat, berdasarkan informasi yang didapatkan, ditemukan bahwa sistem ini belum diimplementasikan di tingkat masyarakat, yang disebabkan karena kerangka waktu pelaksanaan program yang relatif singkat.

Beberapa poin temuan ini menggarisbawahi pentingnya keberadaan pihak yang dapat berperan sebagai perpanjangan tangan pengelola program, yang lebih dekat dan mudah diakses di tingkat kampung, dan dikelola oleh perwakilan masyarakat penerima manfaat program dan aparat kampung. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi di seluruh tahapan program sejak awal (termasuk pemetaan, pendataan calon penerima manfaat, dan juga pengembangan desain dan aturan dalam program).

Memberdayakan organisasi/perkumpulan/forum yang sudah ada di tingkat kampung sebagai perpanjangan tangan Sekber dan pengelola program akan dapat meningkatkan akses masyarakat, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program dan memantau pelaksanaan program. Program juga dapat melibatkan kader kampung dari program lainnya, misalnya operator Sistem Informasi dan Administrasi Kampung (SAIK) di wilayah yang merupakan wilayah kerja KOMPAK di Provinsi Papua untuk perencanaan program pembangunan yang inklusif dan kolaboratif di tingkat kecamatan dan kampung.



## Peningkatan Kapasitas terkait isu GESI



**REKOMENDASI:** Memperluas kegiatan peningkatan kapasitas pada kegiatan terkait isu GESI untuk meningkatkan fokus pada kemampuan analisa dan identifikasi masalah. Kegiatan ini perlu menyoar baik pelaksana program dan anggota/tokoh masyarakat untuk membantu meningkatkan kemampuan program dalam mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu terkait GESI.

Mengingat tujuan program terkait dengan perbaikan gizi anak dan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas terkait GESI yang dilakukan sudah menitikberatkan pada pemahaman mengenai kesehatan anak, peran ibu dalam pengelolaan keuangan, dukungan bapak untuk memprioritaskan kepentingan anak dalam keluarga, serta bagaimana mengkomunikasikan ini kepada kelompok masyarakat yang disasar. Upaya peningkatan kapasitas ini sudah dilakukan melalui strategi komunikasi program yang komprehensif, serta program-program pelatihan.

Menyadari isu-isu mendasar GESI bisa sangat kompleks dan seringkali mengakar dalam sistem dan kehidupan sosial budaya masyarakat, menjadi sangat krusial keberadaan peningkatan kapasitas yang bertujuan meningkatkan pemahaman para pelaksana program terhadap isu ini dalam konteks lokal, khususnya dalam kemampuan analisa untuk mengidentifikasi peningkatan kapasitas yang dibutuhkan, dan juga mengembangkan intervensi untuk mengatasi masalah implementasi terkait GESI di semua tingkatan. Sebuah studi mengenai integrasi mekanisme pemberian dana (*cash-transfer/ CT*) dalam intervensi untuk mengatasi kekerasan berbasis gender, peneliti menemukan bahwa untuk dapat melakukan pemberdayaan perempuan yang efektif, isu-isu terkait kesetaraan gender perlu secara sistematis diperhitungkan dalam desain dan semua kegiatan pelatihan program (Yoshikawa, 2015).

Upaya ini perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara bertahap dan berkelanjutan – tidak hanya pelaksana program yang ada dalam struktur Sekber atau mitra pembangunan yang mendukung pelaksanaan program, tapi juga anggota masyarakat, kader kampung, dan semua pihak yang memiliki pengaruh dalam komunitas masyarakat asli Papua.

## Peran Unit GESI dalam Struktur Sekretariat Bersama (Sekber)



**REKOMENDASI:** Melakukan studi lebih jauh terhadap peran dan efektivitas unit GESI dalam struktur Sekber yang ada di Kabupaten Asmat dan Lanny Jaya, khususnya dalam hal apakah perlu diadopsi di tingkat Provinsi dan di Kabupaten Paniai.

Unit GESI dalam struktur Sekber berpotensi menjadi sumber pembelajaran bagi kabupaten lain dan juga Sekber Provinsi yang selama ini tidak memiliki unit/bidang GESI. Belum diketahui dengan jelas mengapa unit GESI secara khusus hanya ada di dalam struktur Sekber Kabupaten, khususnya di Asmat dan Lanny Jaya, tapi tidak ada di dalam struktur Sekber Provinsi. Lebih jauh lagi, tidak ada informasi yang didapatkan mengenai peran dari unit GESI dalam implementasi program di kedua kabupaten ini.

Studi lebih lanjut dibutuhkan untuk mengkaji lebih jauh isu ini. Pembelajaran dari pengalaman di kedua kabupaten dalam mengoperasikan unit GESI, khususnya di dalam struktur Sekber, akan membantu kabupaten lainnya dalam memahami kebutuhan dan juga tantangan yang dihadapi dalam implementasi program, khususnya yang terkait dengan upaya praktis untuk meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Di samping itu, hasil pembelajaran ini juga dapat membantu menerjemahkan peran unit GESI yang masih terlalu umum dalam dokumen program saat ini,<sup>8</sup> untuk memahami apa yang sebenarnya dilakukan unit GESI.

<sup>8</sup> Tugas/fungsi jabatan struktur Sekber Kabupaten bidang Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam SK Bupati Asmat No 609 tahun 2019: (i) mengkoordinir pengawasan terhadap hak-hak perempuan agar tidak disalahgunakan; (ii) memberikan perlindungan dan perhatian khusus terhadap perempuan dan anak; (iii) memberikan bantuan hukum kepada perempuan yang menjadi korban diskriminasi.

## Tidak adanya tim program di tingkat Kampung



**REKOMENDASI:** Menetapkan apakah tim program di tingkat kampung- seperti yang ada di desain awal- perlu dibentuk untuk meningkatkan penjangkauan masyarakat dan pemilihan penerima manfaat.

Tim program di tingkat kampung tidak pernah dibentuk, meskipun direncanakan dalam desain awal program. Salah satu tantangan yang muncul di ketiga kabupaten adalah pembentukan tim BANGGA Papua di tingkat kampung. Tujuan awalnya adalah untuk memastikan masyarakat yang sulit terjangkau dapat dilibatkan, khususnya yang masih hidup berpindah-pindah, berada di wilayah terpencil, dan memiliki hambatan khusus. Pembentukan tim pada tingkat kampung dinilai tidak memungkinkan karena kapasitas dan keterbatasan sumber daya, terutama dari sisi anggaran. Tidak adanya perwakilan tim program di tingkat kampung, yang lebih dekat dengan kelompok masyarakat, ditemukan sebagai salah satu faktor penyebab masih ada anggota masyarakat yang belum terjangkau program- meskipun sebenarnya memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.

## Pengumpulan data anak atau pengasuh/wali dengan disabilitas



**REKOMENDASI:** Mengeksplorasi kemungkinan untuk dapat mengumpulkan data anak dan pengasuh/wali dengan disabilitas untuk memungkinkan terjadinya penentuan sasaran bantuan yang lebih baik.

Upaya untuk meningkatkan inklusifitas program dalam kelompok penerima manfaat, khususnya untuk anak dengan disabilitas, belum berjalan, meskipun ada dalam rencana awal program. Identifikasi anak dengan kebutuhan khusus, yang sudah diantisipasi dalam pendaftaran, dalam praktiknya belum berjalan karena masih terbatasnya kapasitas tim Sekber dalam melakukan identifikasi/menentukan ragam disabilitas.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa isu terkait data disabilitas, termasuk identifikasi dan registrasi untuk kelompok disabilitas, tidak hanya dialami oleh program ini. Data dari berbagai studi dan implementasi program perlindungan sosial dari berbagai provinsi lainnya di Indonesia menunjukkan isu kurangnya data disabilitas yang dapat diandalkan, konsisten, dan terbaru terjadi di tingkat nasional (AIPEG et al., 2017), dan orang dengan disabilitas seringkali tidak terdaftar dan tidak memiliki akses ke dokumen kependudukan karena sistem yang tidak responsif (PUSKAPA dan KOMPAK, 2020). Oleh sebab itu, program ini (seperti halnya program perlindungan sosial lainnya di Indonesia) dapat berupaya membuat program menjadi lebih inklusif untuk penyandang disabilitas melalui cara berikut, misalnya:

- Menyatakan di dalam dokumen manual/SOP program bahwa anak dengan disabilitas harus diidentifikasi.
- Memasukkan indikator disabilitas dalam form pendaftaran program.
- Melibatkan tokoh kampung untuk melakukan penjangkauan kepada keluarga dengan penyandang disabilitas.
- Menyediakan dukungan khusus untuk penyandang disabilitas saat mengakses poin/lokasi pembayaran saat dilakukan pencairan dana.
- Bermitra dengan mitra organisasi masyarakat setempat (khususnya Organisasi Penyandang Disabilitas/ *Disabled People's Organisations* (DPOs), jika memungkinkan untuk dilakukan) untuk mendukung upaya-upaya di atas.

## Strategi Sosialisasi dan Komunikasi

### Tujuan dari kegiatan sosialisasi dan komunikasi

Strategi sosialisasi dan komunikasi bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat asli Papua serta mempromosikan perubahan perilaku yang positif yang dapat mendorong pemberdayaan perempuan dan penggunaan uang untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak. Transfer dana ke rekening bank atas nama ibu atau wali perempuan, yang dikombinasikan dengan penyampaian pesan untuk perubahan perilaku yang menasar baik laki-laki dan perempuan, bertujuan untuk memberikan kontrol yang lebih besar terhadap perempuan dalam penggunaan dana program.

Pesan yang disampaikan melalui media sosialisasi program memberikan perhatian khusus pada kepentingan ibu dan anak dari kelompok OAP, khususnya yang terkait dengan pentingnya memberi perhatian dan memenuhi kebutuhan gizi dan Kesehatan ibu hamil dan anak-anak. Contoh praktik baik yang mencerminkan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial adalah:

- Melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk tokoh dan pemimpin yang dipercaya, yang bekerja di tingkat komunitas.
- Menggunakan Bahasa lokal dalam penyampaian informasi secara lisan dan tertulis, dan dalam pengembangan media.
- Memperhitungkan kebutuhan dari kelompok-kelompok tertentu (baik calon penerima manfaat maupun yang sudah menjadi penerima manfaat saat ini).

Pesan lain yang juga disampaikan adalah pentingnya laki-laki (sebagai bapak dan suami) mendukung perempuan/ibu dalam penggunaan dana program, dan tidak menggunakan uang tersebut untuk kepentingan sendiri. Pesan-pesan ini diberikan untuk meningkatkan pemahaman suami atau bapak agar memberikan ruang bagi istri atau ibu untuk menjadi penerima dan pengelola dana program. Implementasi BANGGA Papua di masa mendatang perlu lebih secara sistematis mendorong keterlibatan laki-laki dalam kegiatan-kegiatan program.

Upaya-upaya ini perlu dimulai dengan mengidentifikasi isu spesifik yang perlu disasar dan membuka peluang dialog untuk dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong partisipasi laki-laki. Hal ini bukan saja memungkinkan staf program untuk mengidentifikasi ketimpangan informasi dan kekhawatiran dari kelompok laki-laki, jika dilakukan dengan benar, upaya ini juga dapat memaksimalkan pencapaian program dengan mendorong partisipasi laki-laki dalam kelompok masyarakat yang disasar, seperti membantu dalam perawatan anak atau bersikap lebih mendukung peran pasangan mereka dalam mengelola keuangan rumah tangga.

## Mengatasi isu beredarnya informasi yang salah dan kebingungan dalam penggunaan dana program



**REKOMENDASI:** Memperbaiki materi komunikasi untuk penerima manfaat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperjelas bahwa dana program diberikan tanpa syarat tertentu (*unconditional*), dengan tetap mendorong penggunaan dana untuk pembelian kebutuhan untuk dapat meningkatkan kesehatan anak serta mengurangi kemiskinan.

**REKOMENDASI:** Memberikan kejelasan mengenai penanggung jawab utama yang ditunjuk untuk memberikan informasi mengenai program bagi penerima manfaat, kepada siapa mereka bisa bertanya, mengklarifikasi persyaratan, dan mengajukan keluhan.

Berdasarkan wawancara dan diskusi kelompok terarah, terdapat kesan bahwa penerima manfaat seringkali tidak mengetahui informasi mana yang akurat dan kemana mereka dapat mengkonfirmasi. Penerima manfaat menjelaskan yang sering terjadi adalah mereka memutuskan untuk tidak bertanya, dan hanya menerima saja informasi apapun yang diberikan dari berbagai sumber, karena mereka khawatir kepesertaan mereka dalam program akan dihentikan jika mereka mengajukan pertanyaan atau tidak segera mematuhi informasi yang diberikan kepada mereka. Situasi ini menimbulkan kebingungan, dan juga menyebabkan penerima manfaat menjadi tidak dapat secara bebas membuat keputusan sendiri dan berperilaku lebih sebagai penerima bantuan yang pasif.

Hal-hal yang seringkali menimbulkan kebingungan adalah seputar:

- Jumlah dana yang dapat ditarik/dicairkan, dan apakah sisa dana di dalam rekening tabungan dapat dicairkan oleh penerima manfaat.
- Penggunaan dana (apa yang boleh dan tidak boleh dibeli).
- Apakah penerima manfaat wajib membelanjakan uang di pasar 'Swalayan' BANGGA Papua yang direkomendasikan program, segera setelah dana dicairkan.

Menyediakan informasi yang akurat dan memungkinkan individu untuk merencanakan dan mengambil keputusan terbaik untuk mereka beserta keluarganya merupakan bentuk pemberdayaan. Akses terhadap informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat rentan, baik dalam konteks politik dan pemerintahan, serta dalam pembuatan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas hidup (UNESCO, 2009; Jain & Saraf, 2013).

Ketidakakuratan informasi dapat disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, terutama karena:

- Keberadaan individu yang mengambil keuntungan dari keberadaan dan situasi program.
- Tingkat pengetahuan yang masih beragam diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi
- Hambatan bahasa yang memengaruhi tingkat pemahaman di antara kelompok penerima manfaat.

## Penggunaan pesan yang sesuai dengan bahasa, budaya, dan kondisi geografis



**REKOMENDASI:** Memastikan materi komunikasi diterjemahkan ke dalam dialek lokal, menggunakan simbol budaya, religi, dan gambar, simbol geografis, serta pesan yang sesuai dengan situasi wilayah dan kelompok, dan juga menggunakan saluran yang paling efektif untuk menjangkau kelompok yang disasar. (misalnya poster, lembar balik/*flipcharts*, dan video).

Terkait dengan hambatan bahasa, meskipun beberapa media komunikasi sudah menggunakan bahasa lokal, sumber daya penerjemah tidak selalu tersedia, yang seringkali menyebabkan informasi disampaikan dalam Bahasa Indonesia yang tidak dipahami dengan baik oleh sebagian besar penerima manfaat.

Merupakan hal penting juga untuk memastikan visualisasi yang digunakan merefleksikan situasi dan kondisi kehidupan sehari-hari masyarakat Papua. Ini meliputi penggunaan gambar-gambar dengan cara berpakaian yang sesuai dengan budaya lokal, seperti ibu yang menggunakan noken, atau yang menunjukkan rumah-rumah dengan konteks yang sesuai, misalnya rumah dengan gaya dan latar belakang yang sesuai dengan konteks wilayah tersebut (laut, gunung, atau daratan). Simbol-simbol keagamaan yang digunakan juga perlu sesuai dengan konteks, misalnya dengan tampilan gereja dibandingkan masjid, yang lebih umum dan terhubung dengan masyarakat asli Papua.

Untuk jenis media komunikasi, awalnya dikembangkan beragam, meliputi lembar balik/*flipcharts*, poster, brosur, infografis, buku saku, video animasi, video, kotak informasi, buku informasi, spanduk, video dan cerita-cerita praktik baik. Kajian awal mengindikasikan bahwa poster, lembar balik/*flipcharts*, dan video merupakan media yang paling banyak dipilih oleh masyarakat, dan kemudian jenis-jenis media ini diprioritaskan.

## Media komunikasi untuk kelompok dengan kemampuan literasi rendah atau tidak bisa baca tulis



**REKOMENDASI:** Melanjutkan upaya untuk mempromosikan strategi komunikasi yang secara efektif membuat pesan-pesan yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat dan pemangku kepentingan dengan kemampuan literasi rendah/terbatas atau tidak bisa baca tulis, termasuk mengutamakan penggunaan visualisasi dalam materi-materi komunikasi.

Untuk semakin memperkuat upaya dalam mendorong inklusi sosial, dokumen strategi komunikasi terbaru menekankan pengembangan media sosialisasi yang harus memperhitungkan kebutuhan dari kelompok sasaran yang tidak bisa membaca dan tidak memahami Bahasa Indonesia. Sebuah kutipan yang diambil dari strategi ini dapat dilihat seperti di bawah ini:



Salah satu panduan dalam pengembangan media sosialisasi BANGGA Papua, seperti yang tertulis pada dokumen strategi komunikasi.

### PENTING!

Media sosialisasi BANGGA Papua harus memperhitungkan khalayak sasaran yang belum bisa membaca dan kurang paham Bahasa Indonesia. Cara Efektif untuk melayani mereka adalah dengan:

- Meminta bantuan masyarakat setempat yang bisa berbahasa lokal, untuk ikut menjelaskan.
- Menggunakan media sosialisasi visual dan audio visual seperti lembar balik dan video-video
- Menyediakan disain media sosialisasi yang dapat diubah oleh kabupaten agar lebih sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan kabupaten.



Gambar 2: Materi komunikasi visual adalah salah satu instrumen yang paling efektif untuk mengedukasi masyarakat Papua mengenai manfaat program BANGGA Papua. (Lokasi: Tiom Neri, Lanny Jaya. Fotografer: Desy Mutialim.)

## Lokasi yang paling tepat untuk menjadi saluran informasi



**REKOMENDASI:** Memastikan dalam kegiatan komunikasi pesan untuk perempuan dan kelompok rentan disampaikan melalui cara yang paling efektif untuk menjangkau mereka, seperti melalui pusat layanan Kesehatan atau kunjungan ke rumah-rumah.

Tempat-tempat yang paling sering dikunjungi oleh perempuan dilaporkan sebagai kanal informasi yang baik, seperti pusat layanan kesehatan (posyandu and puskesmas), dimana kegiatan sosialisasi dapat dilakukan saat mereka berkunjung. Upaya penjangkauan oleh kader kampung perempuan (kader mama) juga dilakukan melalui kunjungan rumah dan upaya ini telah menjadi mekanisme yang dapat diandalkan untuk menjangkau kelompok yang rentan dan paling sulit diakses, seperti:

- Wanita hamil yang tidak dapat hadir dalam pertemuan sosialisasi
- Penyandang disabilitas, misalnya mereka yang memiliki hambatan mobilitas, atau pendengaran, atau penglihatan.
- Penyandang disabilitas mental dan intelektual atau orang dengan keterbatasan kemampuan untuk memahami pesan yang disampaikan.
- Orang dengan keterbatasan fisik lainnya, misalnya kelompok lanjut usia.

## Dampak dan Hambatan Terkait Aksesibilitas dan Inklusi

### Inklusi keuangan dan informasi terkait layanan perbankan dan hak penerima manfaat



**REKOMENDASI:** Memastikan penerima manfaat dan pemangku kepentingan lainnya diberikan informasi terkini dan akurat mengenai jumlah dana yang akan diterima, alasan mengapa jumlah yang diterima bervariasi di antara penerima manfaat di waktu penarikan, serta batasan-jika ada-jumlah uang yang boleh ditarik dari rekening oleh penerima manfaat.

**REKOMENDASI:** Jika memungkinkan, penerima manfaat harus dapat menyimpan sendiri buku tabungan mereka. Di wilayah yang tidak memungkinkan untuk ini, langkah pengamanan tambahan dan pesan terkait hal ini melalui media komunikasi diperlukan untuk memastikan penerima manfaat memiliki akses yang tidak dibatasi ke rekening tabungan mereka.

Kajian ini menemukan bahwa implementasi program BANGGA Papua telah berkontribusi pada meningkatnya akses ke rekening tabungan. Sebelum menjadi penerima manfaat, banyak ibu yang sebelumnya tidak pernah mengunjungi bank, apalagi memiliki rekening bank atas nama mereka sendiri. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah kesulitan dalam mengakses bank, keterbatasan jumlah cabang bank, dan tingkat pengetahuan serta kepercayaan diri dalam mengakses layanan keuangan. Program BANGGA Papua membuat proses pembuatan rekening bank lebih mudah dan telah membantu perempuan untuk lebih memahami dan percaya diri dalam mengakses layanan perbankan.

Dalam studi sebelumnya mengenai penggunaan dana BANGGA Papua (MAHKOTA, 2019), terlihat bahwa Bank Papua telah membuka lebih dari 16,000 rekening baru di tiga kabupaten, tapi tidak dilakukan penelusuran kepemilikan dari rekening baru ini apakah dibuka oleh individu yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank.

Berikut ini adalah kutipan dari ungkapan responden yang mendeskripsikan bagaimana BANGGA Papua telah membuka akses ke bank untuk Perempuan Papua:



*'Sebelumnya (BANGGA Papua), kami belum pernah ke bank. Sekarang, kami pergi ke bank...(selama penarikan pertama). Kami tidak mengerti pertanyaan dan meminta bantuan untuk menafsirkan. Petugas disana membantu menafsirkan'*

**FGD dengan penerima manfaat, Paniai.**

Cerita-cerita yang dikumpulkan dari waktu pencairan dana pertama kali menunjukkan bagaimana pengalaman mengunjungi dan melakukan transaksi di bank merupakan pengalaman yang jarang dialami oleh Sebagian besar Masyarakat Asli Papua, khususnya para penerima manfaat. Banyak penerima manfaat mengungkapkan pengalaman dan perasaan positif, mulai dari merasa senang dan juga bangga. Dengan memiliki rekening bank, mereka dapat menarik dan membawa uang mereka sendiri untuk pertama kalinya.



*'Saya senang, bangga, luar biasa, khawatir akan kehilangan (uang). Sementara beberapa teman saya tidak mendapatkan uang karena mereka tidak memiliki anak (usia 0 hingga 4 tahun), juga tetangga saya'*

**Wawancara dengan penerima manfaat, Lanny Jaya.**



Gambar 3: BANGGA Papua adalah program perlindungan sosial untuk Perempuan Asli Papua untuk meningkatkan kesehatan anak-anak mereka, dan pada saat yang sama, memperkuat peran perempuan Papua dalam pengelolaan keuangan keluarga. (Lokasi: Pulau Tiga, Asmat. Fotografer: Muammar Karim.)

Melihat lebih jauh pada prosesnya, dalam penarikan dana di awal program, misalnya, penerima manfaat diminta untuk menunjukkan kartu identitas, kartu keluarga (KK), atau surat pernyataan domisili, dan menjawab beberapa pertanyaan. Sebagian besar dari penerima manfaat, khususnya mereka yang tidak bisa berbahasa Indonesia, mengalami kebingungan dan gugup dalam proses pencairan dana. Namun program sudah mengantisipasi hal ini dengan menyediakan layanan bantuan melalui staf Sekber, petugas kesehatan/kader kampung, dan staf Bank Papua. Staf Bank Papua juga perlu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh penerima manfaat dalam proses pencairan, seperti jumlah uang yang dimiliki penerima manfaat di dalam rekeningnya. Mereka juga mungkin perlu memberikan saran agar penerima manfaat menyalurkan uangnya dalam rekening sebagai tabungan, dan kemudian menanyakan jumlah uang yang ingin diambil oleh penerima manfaat.

Didapatkan laporan bahwa jumlah uang yang didapatkan di antara penerima manfaat dan di masing-masing waktu penarikan bisa berbeda-beda. Jumlah pembayaran memang berbeda-beda tergantung dari jumlah anak di dalam keluarga yang mengikuti program dan sangat mungkin staf Bank Papua dan Sekber mengalami kesulitan untuk dapat mengkomunikasikan ini secara tepat kepada penerima manfaat. Oleh sebab itu, program dapat lebih memfokuskan pada bagaimana meningkatkan kapasitas pelaksana program dalam memberikan penjelasan atau memberikan informasi yang akurat mengenai jumlah dana yang akan diterima, alasan mengapa jumlahnya bisa berbeda-beda di antara penerima manfaat dan di waktu penarikan, serta jumlah uang yang bisa diambil oleh penerima manfaat dari rekening bank mereka.

Isu lain yang juga diatur dalam dokumen Petunjuk Teknis Operasional (PTO) BANGGA Papua adalah mengenai penyimpanan buku tabungan, dan disarankan penerima manfaat untuk dapat menyimpannya sendiri. Hal ini memberikan keleluasaan bagi penerima manfaat untuk dapat menabung atau menarik uang kapanpun sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun begitu, hal ini tidak dapat sepenuhnya dilakukan dalam program, karena lokasi pencairan dana di beberapa wilayah, misalnya di Paniai, sudah dipecah ke dalam beberapa kecamatan, dan beroperasi secara manual/*offline*. Buku tabungan yang dimiliki penerima manfaat hanya dapat diperbarui setelah staf Bank Papua kembali ke wilayah yang memiliki jaringan internet.



## Hambatan yang disebabkan oleh faktor transportasi dan kurangnya infrastruktur perbankan



**REKOMENDASI:** Mengeksplorasi strategi untuk meminimalisir hambatan yang dialami oleh perempuan terkait perjalanan jarak jauh dan tingginya biaya yang harus ditanggung sendiri untuk transportasi serta penitipan anak yang tidak ditanggung program. Upaya ini bisa termasuk pemberian tunjangan transportasi, alternatif transportasi bersama, atau mendorong perempuan untuk melakukan perjalanan tanpa membawa anak mereka (dengan catatan perlu untuk melakukan pengaturan untuk penitipan anak)

**REKOMENDASI:** Memastikan lokasi pendaftaran dan pencairan dana memiliki tempat yang didesain sebagai tempat anak bermain atau beristirahat dengan pengawasan, tempat bagi ibu untuk menyusui atau menjaga anak mereka, serta dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Masyarakat Papua memiliki akses terbatas terhadap prasarana layanan keuangan. Hanya ada tiga penyedia layanan keuangan besar di Papua: Bank Papua, Bank Rakyat Indonesia, dan PT Pos. Rasio jumlah bank di Papua adalah 13.4 per 100,000 populasi, atau dua pertiga dari rata-rata nasional 20.5 (Bank Indonesia, 2015).

Kondisi ini dikombinasikan dengan sulitnya akses jalan, terbatasnya transportasi publik, dan tidak ada atau terbatasnya jaringan internet. Kombinasi faktor ini menyebabkan lebih sulitnya bagi perempuan untuk dapat mengakses uang tunai dan layanan, menghabiskan waktu dan uang mereka. Program ini berupaya melakukan solusi yang inovatif untuk mengurangi waktu dan beban perjalanan yang harus ditempuh perempuan dengan menempatkan titik pembayaran di lokasi yang lebih dekat dibandingkan dengan mendatangi cabang bank yang ada di kabupaten.

Meskipun begitu, di samping upaya yang sudah dilakukan, sebagian besar penerima manfaat masih melaporkan bahwa mereka harus menempuh perjalanan jauh dengan anak mereka, karena tidak ada yang dapat membantu menjaga anak mereka di rumah. Seringkali para Ibu harus berjalan kaki, atau membayar biaya transportasi yang tinggi, dan mengantri dalam waktu yang lama untuk mengurus persyaratan administrasi dan memproses pencairan dana. Hambatan-hambatan ini dapat mengurangi manfaat program yang mereka terima, dan pada tingkat tertentu juga menempatkan ibu dan anak dalam risiko; sebagai contoh, ibu dan anak bisa jatuh sakit karena kelelahan, mereka mungkin tidak memiliki uang untuk membeli makanan dalam perjalanan atau saat mengantri, dan tidak ada tempat untuk anak bermain atau beristirahat sambil menunggu pencairan dana.



(P) *[Bagaimana Mama datang ke tempat pendaftaran?]*

(R) *Biasa menyusui, kita pikul. Kita kasih bapak dorang tidak mau jaga. Ada yang tidak pakai payung, ada yang pakai payung.*

(I) *Mama jalan kah?*

(R) *Iya jalan kaki.*

(I) *Tidak pakai ojek?*

(R) *Tidak pakai motor, tidak ada uang. Ada uang kan bisa pakai motor, tidak ada uang ya sudah jalan kaki.*

**FGD dengan penerima manfaat, Asmat.**

Program dapat berupaya terus memperkuat dan memperluas titik-titik lokasi pencairan dana, termasuk dengan menawarkan untuk menambah jumlah dana yang diberikan untuk menutup biaya transportasi dan penitipan anak. Program juga dapat mengeksplorasi kerja sama dengan institusi keuangan untuk memanfaatkan inovasi-inovasi baru atau mengembangkan pendekatan perbankan alternatif yang bisa membantu mengatasi permasalahan infrastruktur di wilayah Papua.

Penerima manfaat juga memberi catatan mengenai hambatan untuk menghadiri pendaftaran dan penarikan dana. Hal ini hanya dapat dilakukan secara langsung oleh ibu atau wali perempuan. Meskipun mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan memastikan individu yang disasar yang benar-benar menerima dana, jarak tempuh perjalanan dan tidak adanya transportasi publik seringkali memaksa penerima manfaat untuk melakukan perjalanan jauh dengan berjalan kaki sambil membawa anak mereka, atau alternatif lain adalah mengeluarkan uang dalam jumlah yang signifikan untuk membayar transportasi.

BANGGA Papua sejauh ini belum mengalokasikan dana tambahan untuk biaya transportasi. Berdasarkan wawancara dengan para penerima manfaat, biaya yang dibutuhkan untuk sekali perjalanan pulang pergi dapat mencapai Rp 400,000 – 500,000 saat mereka harus mencairkan dana. Meskipun pembayaran dilakukan secara lump sum, yang dibayarkan hanya dua kali dalam setahun, jumlah ini masih dirasakan cukup signifikan oleh penerima manfaat dan oleh sebab itu bantuan untuk menambah jumlah dana yang diberikan untuk dapat menutupi biaya transportasi perlu diadvokasi lebih jauh.



*(R) Dari sini kita biasanya turun, numpang kita. Per kepala itu 100 ribu (Rupiah). Jadi kalau kami 2 orang yang turun atau tambah anak kecil mungkin barang 3 orang itu atau 4 orang ya 400,000 (Rupiah).*

*(P) Oh jadi anak kecil juga dihitung?*

*(R) Iya. Apalagi kalau kita bawa barang bawaan banyak*

*(P) itu berapa kalau bawa barang?*

*(R) Bisa sampai 500,000 (Rupiah).*

**Wawancara dengan suami penerima manfaat, Asmat.**

Kajian literatur yang dilakukan menunjukkan bahwa pembangunan yang inklusif perlu dibarengi dengan kebijakan yang mendorong penggunaan infrastruktur publik oleh kelompok rentan (Kanbura & Rauniyarb, 2010). Hal ini juga berarti BANGGA Papua dan program-program lain dengan tujuan yang kurang lebih serupa perlu terus mengangkat isu perbaikan infrastruktur dan fasilitas transportasi sebagai agenda advokasi dalam perencanaan jangka panjang.

## Dampak dan Hambatan Finansial/Keuangan

### Perubahan awal yang didorong oleh pemberian dana melalui rekening atas nama Ibu

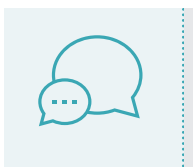
BANGGA Papua menyalurkan dana ke rekening ibu/wali perempuan dengan beberapa pertimbangan utama.

Pertama, karena anak-anak di usia 0-4 tahun secara umum masih sangat lekat dengan ibu mereka, sehingga diharapkan ibu akan mengetahui dengan baik kondisi dan kebutuhan anak.

Kedua, dalam konteks budaya Papua perempuan lebih berperan di area domestik, sehingga diharapkan dengan menyalurkan dana program melalui ibu, penggunaan dana bisa lebih leluasa atau disesuaikan dengan kebutuhan untuk meningkatkan asupan gizi dan kesehatan anak.

Yang terakhir, meskipun masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan pemberdayaan bagi para ibu, mekanisme ini didesain sejak awal untuk memberikan kepercayaan diri dan kesempatan bagi perempuan untuk membuat keputusan-keputusan bagi masa depan anak-anak asli Papua, dan bukan untuk menimbulkan hambatan tambahan bagi perempuan dalam menerima penyaluran dana. Mekanisme ini dibuat untuk memberikan perempuan posisi tawar yang lebih tinggi dalam rumah tangga dan di masyarakat. Melalui studi ini, dilaporkan tidak hanya perempuan memiliki kendali lebih besar untuk memutuskan apa yang perlu dibeli, tapi juga dilaporkan bahwa mereka merasa lebih dihargai karena mereka memiliki kemampuan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Sebuah studi mengenai penggunaan dana BANGGA Papua (MAHKOTA, 2019) menemukan bahwa sebagian besar perempuan menggunakan uang seperti yang diharapkan oleh program. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penyampaian pesan dan sumber daya yang tepat, perempuan akan memilih untuk membeli makanan dan kebutuhan lainnya untuk anak-anak mereka.



*'Mereka yang menerima BANGGA Papua menggunakan uang itu untuk membeli makanan untuk anak-anak, pakaian, dan sabun. BANGGA Papua itu baik. Para Ibu menggunakan uang (untuk membeli sabun) untuk mencuci pakaian (keluarga) mereka.... pakaian anak-anak rapi'*

**Wawancara dengan masyarakat yang bukan penerima manfaat, Lanny Jaya.**

### Pembatasan yang tidak direncanakan agar perempuan berbelanja di pasar swalayan yang disediakan



**REKOMENDASI:** Memberikan pesan yang lebih jelas mengenai peran dari pasar swalayan/toko-toko sementara dan dimana penerima manfaat bisa membelanjakan uang mereka.

Penggunaan pasar swalayan/toko-toko sementara yang disediakan untuk membelanjakan uang sebagai upaya yang bertujuan untuk mempermudah para ibu penerima manfaat membelanjakan uang yang diterima dari program untuk kebutuhan anak-anak mereka telah menimbulkan dampak yang tidak direncanakan.

Tujuan dari upaya ini adalah untuk menyediakan pasar sementara dan meningkatkan akses ke barang-barang yang dibutuhkan oleh keluarga dengan anak di lokasi terpencil dimana fungsi pasar tidak berjalan. Salah satu pemerintah kabupaten kemudian menginisiasi pasar swalayan BANGGA Papua dan toko-toko sementara.

Meskipun begitu, berdasarkan wawancara dan diskusi dengan masyarakat, secara umum, mereka menilai harga barang di pasar swalayan dan toko-toko sementara ini lebih mahal dari pasar/warung setempat. Selain itu, terdapat sejumlah staf pasar swalayan yang menyarankan komposisi barang tertentu. Karena kurangnya pemahaman penerima manfaat mengenai fungsi pasar swalayan/toko-toko sementara ini dan apa yang mereka bisa beli, penerima manfaat mempersepsikan bahwa mereka harus berbelanja di toko-toko yang ditunjuk ini dan hanya membeli barang-barang yang disarankan.

Di saat yang sama, penerima manfaat tidak mengetahui dimana mereka bisa memperoleh informasi yang akurat mengenai ketentuan dan prosedur apakah diharuskan untuk berbelanja di pasar swalayan tersebut.

Tidak ada informasi lebih jauh dari tim program yang mengkonfirmasi aturan ini, tapi keberadaan pasar swalayan BANGGA Papua dilaporkan oleh tokoh masyarakat sudah ada sejak awal program. Akibatnya, terjadi kebingungan yang tidak hanya menyebabkan keluarga penerima manfaat membelanjakan uangnya untuk harga barang yang menurut mereka lebih mahal, tapi juga membuat para penerima manfaat merasa tidak memiliki kebebasan untuk membelanjakan uang mereka di tempat lain, karena mereka khawatir bantuan untuk mereka akan dihentikan. Perlu dicatat bahwa dalam situasi seperti ini, penerima manfaat cenderung merasa bahwa mereka tidak terlalu memiliki posisi tawar. Mereka menganggap diri mereka sebagai peserta program yang harus patuh pada aturan program. Hal ini berarti jika informasi yang akurat tidak tersedia, penerima manfaat akan cenderung menjadi penerima pasif.



*(P) Apakah harus belanja di toko itu Mama?*

*(R1) Harus.*

*(P) Harus? kan bisa toh belanja di pasar. Tidak diwajibkan toh?*

*(R2) Supaya uangnya itu dong tarik kasih masuk lagi, katanya begitu.*

*(P) Siapa bilang?*

*(R2) Petugas dorang yang ibu-ibu BANGGA Papua.*

*(R1) Yang biasa terangkan sama kita begitu. Akhirnya kita cabut uang langsung pakai vier (kendaraan) ke toko itu.*

*(P) Oh, langsung dibawa? Belanja habiskah disana?*

*(R2) Ya saya bawa pulang sisa.*

*(R1) Kan itu buat tanda bukti saja.*

*(R2) Tapi ada yang sering katakan begini, bercerita sedikit gertak-gertak ibu-ibu kan begitu. Kalau kami tidak belanja lagi disitu nanti di kemudian hari kami tidak dapat duit itu. Tidak dapat bantuan lagi.*

**FGD dengan penerima manfaat, Asmat.**



'Semua [penerima manfaat] harus berbelanja di BANGGA Papua swalayan. Ada kendaraan yang disediakan di depan bank yang akan mengantarkan kami ke toko setelah menarik uang. Ada satpam yang akan mengejar kami jika (kami) berbelanja di toko lain...harga dalam ukuran besar harganya 350,000 (di BANGGA Papua swalayan) sementara di toko lain harganya 230,000 (Rupiah). Beberapa yang lain (toko) 220,000 (Rupiah), mereka (staf) memilihnya (barang). Di dalam keranjang besar, sudah dipenuhi dengan nasi, telur, kacang hijau, sabun, popok, minyak goreng. Kami baru saja membayar di kasir...

Setelah ibu (saya) menolak, staf menjadi marah dan bertanya, 'mengapa Anda ingin menyimpan uang itu?'

**FGD dengan penerima manfaat, Asmat.**



'Toko Swalayan BANGGA Papua didirikan sejak awal sosialisasi program BANGGA Papua. Pada saat membelanjakan di toko BANGGA, warga lebih sering tidak bisa memilih barang apa yang akan dibeli. Pihak toko biasanya sudah menyiapkan apa yang harus mereka beli dan mereka tinggal membayar saja. Jadi terkadang uang habis tapi barang yang didapat tidak sesuai dengan kebutuhannya.

Mereka merasa dapat bantuan tapi cara membelanjakan bantuan tersebut diatur oleh Sekber yang menurut mereka tidak manusiawi. Harga yang dipatok oleh Toko BANGGA terlalu tinggi dari tempat lain, sehingga uang yang mereka punya habis dalam sehari.'

**FGD dengan tokoh masyarakat, Asmat.**

## Kepemilikan uang dan rekening bank mendukung pemberdayaan



**REKOMENDASI:** Meneksplorasi mekanisme untuk memantau penggunaan dana untuk tujuan yang direncanakan program, dan memungkinkan adanya umpan balik atau strategi yang dikembangkan jika dana program digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan program. Metode analisa terhadap data bank secara agregat (untuk melindungi privasi penerima manfaat) dari penerima manfaat saat ini dan sebelumnya mungkin dapat dilakukan. Penting untuk memastikan transfer dana yang diberikan tidak terikat pada persyaratan tertentu (unconditional), serta dapat memberdayakan perempuan. Pemahaman lebih mendalam mengenai tekanan yang dialami perempuan untuk berbagi dalam penggunaan dana, dan bagaimana dana digunakan, akan dapat membantu pengelola program untuk lebih memahami desain yang dibutuhkan dalam kegiatan sosialisasi dan komunikasi.

Penerima manfaat merasa kepemilikan uang di dalam rekening bank menggunakan nama ibu membawa perubahan positif bagi mereka, khususnya dalam hal memiliki kendali dalam penggunaan uang, dan memiliki posisi tawar di dalam keluarga (dengan suami), dan juga dengan tetangga serta sanak saudara. Secara umum, banyak kelompok perempuan/ibu Orang Asli Papua bergantung pada suami dan seringkali pendapatan suami mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Merupakan cerita yang cukup umum bahwa suami tidak memprioritaskan kebutuhan keluarga dan menggunakan uang untuk berjudi, membeli minuman keras, rokok, dan pinang.



'Kami dulu sering bertengkar soal uang dengan suami kami. Kami melawan mereka Ketika kami meminta mereka uang untuk membeli makanan (untuk anggota keluarga) di rumah. Sekarang, kita punya uang sendiri. Kita dapat menghabiskan uang kita sendiri untuk (anggota) di dalam rumah, untuk konsumsi sehari-hari, Ketika mereka punya uang, mereka biasanya menghabiskannya untuk minuman keras..'

**FGD dengan penerima manfaat, Asmat**

Untuk kelompok perempuan kepala keluarga, uang yang mereka miliki sangat membantu mereka memenuhi kebutuhan anak-anak dan keluarga, mengingat mereka adalah satu-satunya pencari nafkah. Akses terhadap uang dan rekening bank juga membantu mereka untuk lebih memiliki posisi tawar di lingkungan tetangga dan kerabat.



*'Saya punya empat anak, [dan] suami saya sudah meninggal. Saya tidak tahu siapa yang akan memberi makan anak-anak saya. Tidak ada makanan saat mereka pergi ke sekolah. Saya menggunakan uang BANGGA Papua untuk membeli beras dan bahan makanan lainnya untuk memberi makan mereka.'*

**Perempuan kepala keluarga penerima manfaat, Lanny Jaya.**

Sebagai pengelola utama dana program di dalam keluarga, ibu memiliki kendali lebih besar dalam memutuskan bagaimana dan untuk keperluan apa uang digunakan. Menurut para penerima manfaat, mereka menghabiskan sebagian besar uang mereka seperti yang dihimbau oleh program, yaitu untuk makanan dan kebutuhan anak-anak mereka, khususnya yang berusia 0-4 tahun. Hal ini juga diperkuat oleh cerita yang didapat dari tokoh masyarakat (seperti pendeta, kepala kampung, dan kader kampung), yang melaporkan bahwa mereka hanya bisa memberikan saran, tapi pada akhirnya para ibu yang memutuskan bagaimana uang akan dibelanjakan.



*'Saya memberi tahu mereka cara membelanjakan uang dengan benar, tetapi saya tidak dapat memastikan apakah mereka melakukannya atau tidak..'*

**Kader kesehatan kampung, Lanny Jaya**

Beberapa praktik penggunaan uang yang agak menyimpang dari apa yang diarahkan oleh program juga ditemukan sebelumnya dalam Evaluasi Proses BANGGA Papua (2020).<sup>9</sup> Sebagai contoh, uang digunakan untuk membayar biaya Pendidikan anak yang lebih tua (bukan penerima manfaat), atau diberikan kepada suami, kerabat, orang tua, dan gereja. Praktik ini tidak dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai penyimpangan yang negatif dan harus dipahami sebagai bagian dari konteks budaya komunal masyarakat Papua. Dalam wawancara dan diskusi kelompok terarah (FGD) yang dilakukan, para perempuan menjelaskan kadang mereka memberikan uang kepada suami mereka sebagai ungkapan terima kasih karena sudah membantu selama proses pendaftaran hingga penarikan uang program, kepada orang tua karena sudah membantu menjaga anak-anak mereka, kepada para kerabat karena merasa berempati untuk mereka yang tidak mendapatkan bantuan dan juga untuk menghindari kecemburuan sosial, atau menyumbangkan sejumlah uang kepada gereja sebagai rasa syukur mereka sudah menerima bantuan.



*"Uang itu adalah ucapan terima kasih kepada orang tua kami yang membawa (menjaga) anak-anak kami. Kami juga memberikan uang kepada kerabat yang tidak mendapatkan [uang BANGGA Papua]. [Jumlah uang yang diberikan] tergantung pada kemurahan hati, Rp 50,000, Rp 100,000, atau Rp 200,000. Kami juga membagikan makanan yang kami beli. Kami mengumpulkan anak-anak dari kerabat sehingga mereka bisa makan bersama.'*

**FGD dengan penerima manfaat, Asmat.**

<sup>9</sup> Hanley, C., & Irfani D. (June 2020). BANGGA Papua Process Evaluation: FINAL Report. Whitelum Group.

Praktik lain yang sedikit banyak juga menunjukkan bagaimana istri memegang kendali atas uang, karena mereka adalah pengelola utama dana program, adalah para istri mendorong para suami untuk membantu mereka membuat kandang ayam atau kolam ikan, dan sebagai insentif mereka kemudian membelikan gula, kopi, atau rokok untuk suami mereka, yang sebenarnya tidak direkomendasikan di dalam panduan pelaksanaan program.



*'Saya memberi tahu para Ibu, jika ayah (suami) membangun kandang ayam untuk ibu dan anak-anak, belilah gula, kopi, dan rokok. Ketiga item ini mendorongnya dalam membuat sangkar ini. Atau, jika ia membangun tambak, ia harus menggali (tanah) dan akan Lelah. Jadi, berikan satu bungkus rokok, gula, dan kopi, tidak lebih dari Rp 150,000 per hari.'*

**Kader kesehatan kampung, Paniai.**

Praktik-praktik yang disebutkan di atas berpotensi untuk merangsang ekonomi lokal jika uang kemudian digunakan untuk kegiatan produktif. Hal ini berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat, seperti yang diharapkan program. Namun, jika dilihat lebih jauh, praktik ini dapat merugikan perempuan dan anak-anak, karena dalam konteks budaya komunal, penerima manfaat bisa merasa wajib membagikan uang atau barang yang dibeli di masyarakat atau lingkungan rumah tangga yang lebih luas (Clark & Mills, 2012). Meskipun begitu, sejauh ini tidak ada bukti mengenai ini yang ditemukan dalam program BANGGA Papua.

## Penggunaan dana program dan memasukan peruntukan dana pada kegiatan yang menghasilkan uang



**REKOMENDASI:** Mengkaji materi komunikasi untuk memastikan kejelasan informasi yang diberikan mengenai penggunaan dana dan untuk jenis barang serta layanan seperti apa. Selain itu, perlu juga untuk memasukkan kegiatan dan inisiatif yang menghasilkan uang/produktif, yang dapat memungkinkan keluarga memenuhi kebutuhan anak dalam jangka waktu panjang (misalnya peternakan yang dikelola keluarga) sebagai contoh baik penggunaan dana yang diharapkan oleh program.

Dalam kegiatan sosialisasi penggunaan dana, program merekomendasikan agar dana digunakan untuk membeli barang-barang untuk kebutuhan anak-anak, seperti makanan, pakaian, dan produk-produk terkait kesehatan.

Hal yang menarik adalah, praktik baik lainnya dalam menggunakan dana program, yang tidak ada di dalam panduan program, juga ditemukan. Salah satunya adalah penggunaannya untuk memulai bisnis kecil-kecilan, seperti beternak ayam, membeli jaring ikan, membuat kolam, membeli bibit-bibit untuk bertani, dan membuka warung sederhana yang dikelola bersama suami dan anggota keluarga lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, praktik-praktik ini dilaporkan sebagai strategi untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga, dan juga untuk menyediakan pasokan nutrisi anak dalam jangka panjang. (misalnya dari memproduksi atau menjual daging dan telur). Lebih jauh lagi, praktik-praktik ini membuat para ibu merasa lebih dihargai, karena tidak hanya mereka memiliki kendali atas uang, tetapi juga bisa berkontribusi menambah pendapatan rumah tangga. Disarankan untuk memasukkan praktik-praktik baik ini dalam materi komunikasi.



*Semua (penerima manfaat) membeli bebek, ayam. Kami membeli beberapa (tali) di Enaro. Kami memberi makan anak-anak kami dengan telur-telur itu. Beberapa telur juga menetas, tujuh ayam, lima dan empat.'*

**FGD dengan penerima manfaat, Paniai.**



■ ..... Gambar 4: Alih-alih membeli telur dan sayuran, beberapa ibu menggunakan dana program untuk beternak ayam, dan menanam sayuran, sehingga mereka dapat memperoleh lebih banyak telur dan sayuran untuk anak-anak mereka. (Lokasi: Bibida, Paniai. Fotografer: Dewi Malik.)



## Dampak dan Hambatan Kesehatan dan Gizi

### Perubahan pola makan dan asupan gizi yang dilaporkan

Wawancara dan diskusi kelompok terarah (FGD) melaporkan bahwa para Ibu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai gizi, bagaimana memasak makanan sehat, serta bagaimana menjaga kebersihan. Temuan ini konsisten dilaporkan di seluruh Kabupaten dan untuk kelompok yang berbeda. Hal ini juga diterjemahkan -berdasarkan umpan balik- menjadi perbaikan pola makan anak, terutama dalam hal mengkonsumsi makanan yang bergizi dan lebih bervariasi – meskipun dalam beberapa kasus, perubahan pola makan tidak selalu menjadi yang lebih bergizi (seperti mengganti sagu dengan nasi).



*'Sebelumnya (kami) tidak punya banyak uang untuk membeli makanan yang bervariasi untuk anak-anak. Itu (telah) berubah sekarang. Ibu punya uang untuk membeli lebih banyak (bervariasi) makanan untuk anak-anak.'*

**FGD dengan penerima manfaat, Paniai.**



*Kami biasa makan [dan memberi makan anak-anak kami dengan] sagu, dan ikan bakar. Sekarang, setelah menerima BANGGA Papua, kami makan dan memberi makan anak-anak kami dengan nasi, ikan goreng, dan buah-buahan.'*

**FGD dengan penerima manfaat, Paniai.**



*'Sebelumnya, (saya) memberi makan anak-anak saya dua kali, tidak sarapan. Sekarang, saya bisa menyediakan sarapan, memberi mereka makan lebih banyak, membuat beberapa kue dan bubur.'*

**Wawancara dengan penerima manfaat kepala keluarga perempuan, Lanny Jaya.**



Gambar 5: Ribuan ibu berkumpul dalam kegiatan pencairan dana BANGGA Papua. Komite Kabupaten dan Dinas Kesehatan Kabupaten bekerjasama untuk mengedukasi para ibu mengenai pentingnya kesehatan anak dan mengadvokasi mereka untuk menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan gizi anak mereka (Lokasi: Pulau Tiga, Asmat. Fotografer: Syaifullah.)

## Perubahan perilaku menjaga kesehatan dan potensi meningkatnya angka kehamilan



**REKOMENDASI:** Melanjutkan penyediaan layanan kesehatan di lokasi pencairan dana, memungkinkan perempuan dan anak-anak mereka mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan dirujuk ke layanan kesehatan berikutnya, sesuai dengan kebutuhannya.

**REKOMENDASI:** Mengeksplorasi lebih lanjut melalui studi dan analisis terhadap data-data status kesehatan, apakah ada peningkatan tingkat kelahiran, alasannya, serta strategi untuk meminimalisir dampak yang tidak direncanakan ini.

Perubahan lain yang terobservasi di tingkat masyarakat yaitu yang terkait dengan layanan kesehatan. Hal ini terkait dengan peningkatan jumlah ibu hamil dan anak yang mengakses layanan kesehatan, khususnya di Paniai dan Asmat. Peningkatan kunjungan ke layanan kesehatan terjadi baik di layanan kesehatan reguler dan juga yang disediakan di lokasi pencairan dana. Layanan-layanan ini mencakup penyediaan imunisasi, vitamin, kain kelambu/jaring nyamuk, pengukuran tinggi dan berat anak, serta pemeriksaan ibu hamil.

Penyediaan layanan kesehatan di lokasi pencairan dana dilaporkan menjadi strategi yang berhasil meningkatkan konsultasi ibu dan anak. Kelompok ini biasanya sulit untuk dijangkau, mengingat mereka tinggal di daerah terpencil.

Dilaporkan bahwa peningkatan kunjungan ibu dan anak ke layanan konsultasi kesehatan didasari oleh motivasi ibu yang ingin anaknya mendapat pemeriksaan kesehatan (tidak hanya karena merupakan persyaratan program). Kelompok penerima manfaat melaporkan bahwa mereka berharap dihubungkan oleh penyedia layanan kesehatan ke pendaftaran BANGGA Papua. Dilaporkan juga ada peningkatan pada kunjungan ibu hamil untuk layanan perawatan antenatal dan bersalin di layanan kesehatan. Motivasi utama yang dilaporkan adalah agar diterbitkannya akta kelahiran dan didaftarkan ke program.

Potensi kecenderungan negatifnya adalah peningkatan angka kelahiran yang dilaporkan di desa-desa. Hal ini tidak diverifikasi dengan data, tapi berdasarkan wawancara dan diskusi kelompok terarah. Penerima manfaat melaporkan adanya motivasi yang kuat untuk hamil agar dapat mengikuti program dan mendapatkan bantuan. Studi lebih lanjut diperlukan untuk dapat menentukan apakah ada perubahan pada tingkat kelahiran sebagai dampak dari program.



*'Ayah (suami) menginginkannya (untuk memiliki lebih banyak anak). Saya berkata saya Lelah. Ayah (suami) berkata, ' tidak apa apa, ini adalah uang BANGGA. Dia (anak) akan memberi makan dirinya sendiri dengan menggunakan uang BANGGA. Kemudian, tambahkan lagi (bayi), meskipun saya mengatakan sudah Lelah. Itu terjadi. Ada tambahan sampai 13 (anak-anak).'*

**Penerima manfaat, Asmat.**



*'Banyak ibu hamil sekarang, anak pertama, anak kedua, anak keempat, bahkan anak ketujuh.'*

**FGD dengan penerima manfaat, Paniai.**

Meskipun literatur secara global umumnya menunjukkan bahwa program penyaluran dana tunai (*cash transfers*) tidak memengaruhi jarak kelahiran secara negatif (sebagai contoh lihat Bastagli et al., 2016, and Stecklov et al., 2006), laporan ini perlu ditelusuri lebih jauh karena berpotensi kontraproduktif terhadap tujuan program. Beberapa penelitian yang melihat pada hubungan antara ukuran keluarga dengan kondisi anak menunjukkan indikasi dampak negatif dari ukuran keluarga terhadap kesehatan anak. Analisis pada tiga gelombang pertama (1993, 1997, and 2000) dari Survei Kehidupan Keluarga Indonesia/ *Indonesian Family Life Survey* (IFLS) menemukan pengaruh negatif yang signifikan dari ukuran keluarga terhadap ketinggian anak usia 2-12 tahun (Hatton et al., 2018). Pengaruh ini erat kaitannya dengan pendidikan ibu yang rendah, dan berlaku baik di konteks wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Selain itu, analisis pada data IFLS 2007 secara statistik menemukan efek negatif yang signifikan dari urutan kelahiran terhadap skor kognitif anak-anak dengan urutan kelahiran yang lebih tinggi memiliki rata-rata skor kognitif yang lebih rendah (Septami & Wisana, 2018). Studi ini mengungkapkan bahwa saudara kandung cenderung tidak menerima bagian yang sama dari sumber daya yang diberikan oleh orang tua. Dari sisi beban kerja ibu, memiliki banyak anak juga artinya semakin besar beban kerja dalam perawatan anak, yang pada akhirnya tidak hanya memengaruhi kualitas kesehatan anak, tapi juga menghambat partisipasi mereka di ranah publik.

## Dampak dan Hambatan Terkait Kekerasan Berbasis Gender

### Potensi dampak sampingan terhadap meningkatnya kekerasan berbasis gender (berdasarkan bukti yang sifatnya anekdototal)



**REKOMENDASI:** Menelusuri lebih jauh untuk mengukur skala dan cakupan konflik domestik/rumah tangga dan kekerasan berbasis gender sebagai dampak program.

**REKOMENDASI:** Mengantisipasi peningkatan risiko perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dan mengembangkan strategi pencegahan untuk mengatasi risiko ini.

**REKOMENDASI:** Mempertimbangkan peningkatan upaya untuk menysar kelompok laki-laki untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen mereka dalam meningkatkan gizi anak tanpa harus menjadi pengelola dana program.

Meskipun bukti secara global menunjukkan bahwa program penyaluran dana tunai (*cash transfers*) untuk perempuan cenderung memiliki dampak positif untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga/ oleh pasangan intim (Buller et al., 2018), bukti anekdototal mengindikasikan adanya kemungkinan ketegangan di dalam rumah tangga meningkat. Beberapa responden melaporkan bahwa mereka mendengar dan menyaksikan kejadian pertengkaran suami dan istri di kampung. Meskipun begitu, tidak ada responden yang diwawancarai mengalami langsung hal ini. Menurut mereka, suami mereka mengerti bahwa uang program harus digunakan hanya untuk kepentingan anak-anak mereka.

Penelusuran lebih jauh dibutuhkan untuk mengukur skala dan cakupan masalah ini. Di Papua, terdapat konteks budaya patriarki yang kuat yang menempatkan suami sebagai pengambil keputusan dan pengelola keuangan keluarga. Laki-laki biasanya ditempatkan sebagai pemimpin, dan percaya mereka memiliki hak untuk memegang kendali atas sumber daya dan proses pengambilan keputusan. Perempuan Papua umumnya juga percaya bahwa mereka layak ada di bawah laki-laki dan bahkan dilecehkan (Badan Pusat Statistik, 2013).

Sebuah studi yang melihat pengalaman hidup terkait dengan kekerasan pada laki-laki dan perempuan di Papua, menunjukkan bahwa kekerasan fisik, kekerasan oleh pasangan intim, kekerasan emosional, dan perilaku mengendalikan/membatasi ditemukan sebagai hal yang umum, sementara jika dibandingkan dengan laki-laki, perempuan ditemukan lebih besar kemungkinannya untuk mengalami bentuk kekerasan yang lebih parah dan juga mengalami kekerasan berkali-kali (UNDP, 2016). BANGGA Papua dan program perlindungan sosial lainnya perlu lebih sensitif dalam menggunakan pendekatan yang dapat meningkatkan, memperburuk, atau mempertajam ketegangan dalam rumah tangga.



*'Para suami mabuk, lalu memukuli istri untuk mendapatkan uang untuk membeli minuman keras. Karena itu, saya telah melaporkan ke polisi dua kali (kasus). Karena, menurut informasi yang saya dapatkan, uang [dari BANGGA Papua] bukan untuk membeli minuman keras.'*

**Wawancara dengan ayah penerima manfaat, Asmat.**

Program perlu secara sadar dan sistematis mempertimbangkan tingginya risiko kekerasan berbasis gender. Perempuan biasanya secara ekonomi bergantung pada pasangan mereka, dan konteks sosial budaya setempat sarat dengan praktik yang mencerminkan ketimpangan gender, serta mendukung otoritas laki-laki terhadap perempuan. Faktor-faktor ini dilaporkan berkontribusi meningkatkan risiko terjadinya kekerasan berbasis gender dalam program yang memberikan akses finansial kepada perempuan (Yoshikawa, 2015).

Program juga perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan upaya menysasar kelompok laki-laki dalam peningkatan pemahaman dan komitmen mereka untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak tanpa harus menjadi pengelola dana program. Wawancara dengan kelompok masyarakat laki-laki menunjukkan bahwa para lelaki merasa keterlibatan mereka dalam program sangat dibatasi, sementara mereka berharap bisa ikut berperan.

Akan menjadi sangat penting melakukan studi lebih lanjut yang didesain dengan hati-hati untuk mengidentifikasi prevalensi kekerasan berbasis gender dan isu terkait lainnya, untuk memahami lebih jauh potensi dampak yang tidak direncanakan oleh program. Selain itu, pelaksanaan studi mengenai kekerasan berbasis gender akan membutuhkan layanan rujukan, dukungan, dan/atau perawatan bagi korban yang teridentifikasi.



*'Ketika di Agats, sang ibu menarik uang BANGGA Papua. Dia pergi ke BANGGA swalayan dan tidak diizinkan berbelanja di toko lain. Dia harus menghabiskan uang disana. Semua item sudah ditentukan sebelumnya. Dia menghabiskannya (uang) di swalayan.*

*Sang suami yang menunggu bertanya kepada ibu, " Apakah masih ada uang?"*

*Dia menjawab, " Saya mendapat semua barang ini."*

*Dia kemudian memukulnya'*

**FGD dengan tokoh masyarakat, Asmat.**

## Kelanjutan dan Pembiayaan Program– Risiko Utama

### Meningkatnya kepercayaan dan pemahaman kelompok Orang Asli Papua mengenai program BANGGA Papua



**REKOMENDASI:** Mengenali risiko-risiko yang mungkin muncul dari peningkatan cakupan atau penutupan program BANGGA Papua. Dampaknya mungkin berkontribusi terhadap berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik jika program dibatalkan atau tidak dilanjutkan setelah kegiatan pilot selesai dilakukan. Jika program akan dilanjutkan setelah pilot selesai, dibutuhkan komitmen jangka panjang untuk pembiayaan, kesesuaian antara prinsip dan pendekatan yang digunakan program, serta hubungan berkelanjutan dengan kelompok-kelompok masyarakat.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, anggota masyarakat melaporkan bahwa mereka merasa enggan mendaftar ke program BANGGA Papua karena mereka tidak percaya kalau bantuan akan diberikan.

Terlepas dari hal ini, kepercayaan kelompok masyarakat Orang Asli Papua terhadap program BANGGA Papua sudah mulai tumbuh karena masyarakat sudah merasakan manfaat program. Dilaporkan juga bertambahnya tokoh masyarakat lokal, seperti kader kesehatan kampung, yang telah membantu mengurangi persepsi masyarakat mengenai program ini sebagai inisiatif yang sifatnya instruksi semata (*top-down*) dan mewujudkan dukungan masyarakat yang lebih besar terhadap program. Ini memberikan peluang untuk memperluas pesan dan isu-isu yang ditangani program, seperti kesetaraan gender, kekerasan berbasis gender, dan pengelolaan keuangan rumah tangga.

Meskipun begitu, hal ini juga mempertegas risiko dari program perlindungan sosial -jika tidak didanai atau diperkecil cakupannya- dapat lebih jauh mengikis kepercayaan terhadap institusi publik. Diberhentikannya pemberian dana tunai di tahun 2020 – awalnya karena realokasi untuk prioritas yang lain di provinsi- mempertegas risiko ini. Penting bagi pemerintah Provinsi Papua dan pemangku kepentingan terkait dari pemerintah di tingkat nasional berkomitmen pada pendanaan jangka panjang, kesesuaian antara prinsip dan pendekatan yang digunakan program, serta hubungan berkelanjutan dengan kelompok-kelompok masyarakat.



Gambar 6: Salah satu tantangannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. BANGGA Papua memberdayakan pemimpin masyarakat, tokoh agama, dan kader posyandu untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. (Lokasi: Yatamo, Paniai. Fotografer: Sekber, Paniai.)

## Persepsi Pemangku Kepentingan mengenai dampak terkait kesetaraan gender dan inklusi sosial /*Gender Equality and Sosial Inclusion (GESI)*<sup>10</sup>

KELOMPOK	PENGALAMAN POSITIF	PENGALAMAN NEGATIF
<b>Individu dan rumah tangga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anak-anak dilaporkan lebih sehat karena mengkonsumsi makanan yang lebih bervariasi dan bergizi.</li> <li>Perempuan merasa lebih dihargai dengan memegang uang mereka sendiri dan lebih bisa bernegosiasi dengan suami mereka.</li> <li>Perempuan merasa mereka bisa mengambil keputusan dan menjadi lebih leluasa dalam menggunakan uang, tidak lagi harus berdebat karena meminta uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari dari suami mereka.</li> <li>Lebih banyak perempuan (dan rumah tangga) yang dilaporkan memiliki akses ke rekening bank.</li> <li>Rumah tangga melaporkan munculnya inisiatif mendirikan bisnis keluarga/ kegiatan yang menghasilkan uang</li> <li>Rumah tangga melaporkan bahwa uang tunai membantu keluarga mengatasi kekurangan untuk membeli kebutuhan darurat, seperti makanan.</li> <li>Anak-anak dilaporkan memakai pakaian yang lebih bersih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perempuan melaporkan terjadinya perdebatan karena suami mereka meminta uang untuk penggunaan yang tidak direkomendasikan program.</li> <li>Dilaporkannya potensi pengurangan jarak kelahiran/ peningkatan angka kelahiran</li> <li>Anak-anak dilaporkan menjadi kurang suka dengan makanan asli daerah (contoh: sagu) dan memilih alternatif (seperti nasi). Nasi memiliki kandungan gizi lebih rendah dibandingkan sagu dan oleh karena itu dibutuhkan jenis makanan lain untuk ditambahkan (seperti sayur-sayuran)</li> </ul>
<b>Komunitas dan masyarakat luas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kesadaran baik pada laki-laki maupun perempuan mengenai pentingnya menggunakan dana untuk meningkatkan gizi anak.</li> <li>Dilaporkannya peningkatan akses anak dan perempuan, khususnya ibu hamil, ke layanan kesehatan di posyandu.</li> <li>Dilaporkannya peningkatan jumlah ibu bersalin di fasilitas kesehatan.</li> <li>Peningkatan cakupan layanan dokumen administrasi kependudukan/ CRVS (<i>Civil Registration and Vital Statistics</i>) untuk anak Orang Asli Papua dan orang tuanya (contoh: akte kelahiran, NIK/KTP).</li> <li>Meningkatnya jumlah uang tunai dalam perekonomian setempat menjadi stimulus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikasi potensi meningkatnya pungutan liar, setidaknya ada 1 kasus kepala kampung meminta pungutan liar untuk pendaftaran.</li> <li>Teridentifikasinya kemungkinan kasus pemalsuan data penerima manfaat.</li> <li>Dilaporkannya peningkatan harga barang-barang di waktu pencairan dana program.</li> <li>Pasar swalayan/toko-toko sementara dilaporkan memberikan persyaratan tertentu dalam penggunaan dana (dan menjual dengan harga yang lebih mahal)</li> </ul>

<sup>10</sup>Untuk menentukan sejauh mana perubahan-perubahan ini berhubungan dengan atau secara langsung dipengaruhi oleh program akan dibutuhkan studi lanjutan.

## Lampiran A:

# Pertimbangan aspek Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) pada tahapan berbeda dalam implementasi program

Program perlindungan sosial BANGGA Papua memiliki 5 tahapan utama. Bagian ini menguraikan ringkasan dari masing-masing tahapan yang perlu dilihat dengan perspektif GESI. Ini mencakup sosialisasi dan komunikasi program di awal dan yang sedang berjalan, dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada penerima manfaat, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Berikutnya adalah identifikasi dan pendaftaran penerima manfaat yang memenuhi syarat, penyaluran dan pencairan dana (dan kegiatan terkait lainnya), serta pengaturan dan implementasi mekanisme akuntabilitas dan penanganan keluhan yang memadai.

<b>Sosialisasi dan komunikasi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengidentifikasi dan mengakomodir kebutuhan khusus dengan cara:<ul style="list-style-type: none"><li>– Mengadakan pertemuan tatap muka untuk sosialisasi program kepada kelompok masyarakat, baik secara individual dan berkelompok, untuk memfasilitasi proses komunikasi dan memastikan pemahaman.</li><li>– Melaksanakan pertemuan dalam kelompok terpisah untuk laki-laki dan perempuan.</li><li>– Mendampingi orang tua yang tidak bisa baca tulis.</li><li>– Mengadakan pertemuan khusus untuk kelompok penyandang disabilitas.</li><li>– Memastikan prosedur dan persyaratan dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang disasar; misalnya, dengan mengalokasikan waktu yang cukup untuk melakukan proses verifikasi terhadap dokumen-dokumen pendukung.</li></ul></li><li>• Menggunakan forum lokal/setempat yang sudah ada untuk menyebarkan informasi: gereja, posyandu (pos pelayanan terpadu), pertemuan adat, dan kegiatan organisasi perempuan berbasis komunitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).</li><li>• Melibatkan kepala kampung dan bupati, tokoh agama, tokoh adat, pemimpin kelompok perempuan, anak muda, guru, dan petugas kesehatan di puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) dan kader posyandu, bidan puskesmas, bidan desa, dan pihak lain yang suaranya didengarkan dan dipercaya oleh masyarakat setempat.</li></ul>
<b>Identifikasi dan pendaftaran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemetaan dan penentuan penerima manfaat dilakukan melalui penjangkauan ke masyarakat oleh pemerintah kampung/kepala kampung/kader posyandu.</li><li>• Informasi pendaftaran terletak di tempat-tempat yang mudah diakses dan dilihat oleh masyarakat; misalnya melalui pengumuman di gereja, dan papan informasi bank.</li></ul>
<b>Penyaluran dana</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diberikan ke rekening ibu atau wali perempuan.</li><li>• Dilakukan sebagian besar melalui Bank Papua, yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.</li></ul>
<b>Pencairan dana</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penjadwalan pencairan dana untuk masing-masing kampung.</li><li>• Menempatkan titik pembayaran/pencairan dana di lokasi yang lebih dekat ke kampung.</li><li>• Menyediakan layanan dampingan teknis dalam pengisian formulir-formulir bank dengan informasi yang disediakan dalam bahasa lokal.</li><li>• Menyediakan layanan edukasi kesehatan, imunisasi, dan pemeriksaan ibu hamil di lokasi pencairan dana.</li></ul>
<b>Penanganan keluhan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membangun sistem penanganan keluhan untuk membuka akses bagi partisipasi masyarakat luas dalam memberikan masukan dan keluhan mengenai pelaksanaan program, untuk mencapai perbaikan program.</li></ul>



## Lampiran B:

# Penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) dalam intervensi program

Analisa lebih jauh terhadap hasil implementasi program di lapangan, yang dilakukan berdasarkan arahan PTO, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GESI diterapkan pada beberapa mekanisme dan intervensi program:

<b>Rekrutmen staf Sekretariat Bersama (Sekber)</b>	<p>Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi dasar pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) secara eksplisit mengatur perlunya merekrut anggota sekber laki-laki dan perempuan. Terlepas dari upaya menyediakan kesempatan yang sama terhadap pekerjaan dan peningkatan kapasitas, ini merupakan upaya penting untuk meningkatkan sensitivitas terhadap kebutuhan dan isu-isu perempuan, khususnya ibu dari anak-anak penerima manfaat, dan pengelola utama dana program dalam rumah tangga penerima manfaat.</p> <p>Secara eksplisit juga tertulis dalam dokumen PTO mengenai rekrutmen Orang Asli Papua sebagai staf yang dilatih agar memiliki ketrampilan yang dibutuhkan oleh Sekretariat. Ini merupakan upaya program yang mempertimbangkan prinsip-prinsip inklusi sosial, khususnya partisipasi dan ketelribatan kelompok-kelompok yang disasar oleh program.</p>
<b>Menentukan sasaran penerima manfaat program</b>	<p>Program menasar anak-anak Orang Asli Papua (salah satu atau kedua orang tua anak adalah OAP), yang berusia 0-4 tahun dan tinggal di wilayah program, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan. Ini menggarisbawahi kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak dasar, tidak mendiskriminasi laki-laki dan perempuan.</p> <p>Lebih jauh lagi, menasar anak OAP berdasarkan garis keturunan ayah dan/atau ibu juga merefleksikan penerapan prinsip kesetaraan gender, khususnya dalam konteks Papua dimana nilai-nilai patriarki masih mendominasi ranah publik dan pengambilan keputusan didalam rumah tangga/ keluarga.</p>
<b>Penunjukan ibu/wali perempuan dari anak penerima manfaat sebagai pengelola utama dana program di dalam rumah tangga</b>	<p>Mekanisme ini salah satu pendekatan khusus dalam program untuk mendorong kesetaraan gender, khususnya dalam meningkatkan akses dan partisipasi perempuan OAP untuk memengaruhi pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dan penggunaan uang di dalam keluarga. Pendekatan ini adalah mekanisme khusus, yang diharapkan dapat membawa pengaruh yang signifikan terhadap posisi perempuan OAP di dalam rumah tangga, karena dalam konteks Papua hal ini menantang budaya patriarki yang masih menempatkan laki-laki/suami sebagai pengambil keputusan, khususnya untuk mengelola keuangan keluarga.</p> <p>Lebih lanjut, penyaluran dana melalui transfer ke rekening bank juga membuka akses perbankan bagi perempuan OAP yang belum pernah memiliki rekening bank. Ini bisa menjadi pintu masuk bagi produk keuangan dan perbankan lainnya, yang pada akhirnya dapat menjadi potensi untuk meningkatkan literasi keuangan perempuan OAP.</p>

<p><b>Pelibatan masyarakat dan kelompok perempuan dalam upaya meningkatkan pengetahuan mengenai program</b></p>	<p>Menyadari kompleksitas dalam penjangkauan ke masyarakat asli Papua, baik karena faktor geografis maupun sosial budaya, program memberdayakan kader perempuan, kader kesehatan, tokoh adat, dan pemimpin agama di kampung untuk mensosialisasikan program dengan cara yang dapat diterima dan dipahami oleh calon penerima manfaat.</p> <p>Pada tahun 2019, melalui pertemuan koordinasi Sekber, diputuskan untuk melibatkan lebih banyak organisasi perempuan berbasis masyarakat, PKK, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk memperluas pengaruh dan jangkauan program. Hal ini diakomodir dengan pengalokasian dana operasional Sekber kepada PKK Provinsi dengan harapan bahwa mereka akan berpartisipasi aktif dalam kegiatan BANGGA Papua, mulai dari tingkat provinsi hingga ke kelompok dasa wisma<sup>11</sup> di tingkat kampung. Dalam praktiknya, belum terlihat peran nyata PKK Provinsi dalam pelaksanaan program hingga saat ini.</p> <p>Praktik yang berbeda ditemukan di tingkat kabupaten. Di Paniai misalnya, PKK di tingkat Kabupaten cukup berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan melakukan penjangkauan untuk pendaftaran. Contoh keberhasilan program dalam meningkatkan cakupan sasaran sosialisasi melalui pelibatan kelompok komunitas dan kelompok perempuan dapat menjadi pembelajaran bagi komponen lain dalam program, dan tentunya diperlukan penelusuran lebih jauh untuk memahami mengapa keterlibatan PKK Provinsi dalam pelaksanaan program belum berjalan seperti yang diharapkan.</p> <p>Pelibatan PKK sebagai salah satu organisasi perempuan yang keberadaan struktur, peran, dan sumber dayanya sudah jelas dari tingkat provinsi/kabupaten hingga ke tingkat kampung, secara khusus akan memerlukan upaya kolaborasi dan pendampingan yang berkesinambungan karena masih sangat berpihak pada penempatan peran perempuan di ranah domestik. Meskipun begitu, dengan potensi jangkauan terhadap kelompok perempuan yang dimiliki, pelibatan PKK menjadi salah satu upaya yang dinilai penting untuk terus diagendakan dalam program.</p>
<p><b>Penggunaan bahasa daerah/ setempat untuk memaksimalkan jangkauan pemberian informasi mengenai program</b></p>	<p>Upaya ini merupakan salah satu pendekatan khusus yang dapat dilihat sebagai salah satu penerapan prinsip inklusi sosial. Penggunaan bahasa lokal adalah upaya untuk memastikan kelompok masyarakat adat yang disasar memiliki akses dan mampu memahami informasi yang diberikan, yang akan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam program.</p>
<p><b>Meningkatkan akses terhadap dokumen kependudukan</b></p>	<p>Kepemilikan dokumen legal dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) merupakan salah satu hambatan utama yang dialami OAP dalam mengakses layanan dan program pemerintah, dan merupakan salah satu penyebab utama mereka tereklusi dari berbagai program bantuan.</p> <p>Program berupaya untuk menyasar masalah ini dengan mempermudah proses pendaftaran calon penerima manfaat melalui kerja sama lintas sektor di kabupaten. Ini berarti OAP yang memenuhi syarat dan berhak menjadi penerima manfaat terfasilitasi haknya sebagai WNI untuk memiliki dokumen kependudukan. Di salah satu kabupaten pilot (Asmat), misalnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), yang juga adalah bagian dari Sekber, menyediakan meja layanan di tingkat kampung agar anggota masyarakat yang membutuhkan bisa langsung mencetak dokumen identitas mereka.</p> <p>Upaya ini dapat dilihat sebagai intervensi khusus yang sensitif terhadap masalah dan kebutuhan kelompok OAP, yang mencerminkan penerapan prinsip inklusi sosial. BANGGA Papua memberikan insentif penting bagi keluarga untuk mengurus administrasi kependudukan dengan Dinas Dukcapil, dan berhasil meningkatkan cakupan administrasi secara substansial.</p> <p>Hal ini khususnya terjadi di Asmat, dimana pemerintah daerah menerbitkan 16,000 akta kelahiran untuk anak-anak dalam program BANGGA Papua. Sampai dengan saat pengambilan data dalam evaluasi ini dilakukan, tercatat cakupan kepemilikan NIK di tiga kabupaten telah mencapai lebih dari 50% (Hanley &amp; Irfani, 2020).</p>
<p><b>Pemanfaatan dana program untuk tujuan yang menguntungkan masyarakat yang lebih luas</b></p>	<p>Dana yang berputar di masyarakat melalui transaksi pembelian di warung/pasar setempat diharapkan menjadi penggerak ekonomi yang dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan, setidaknya di tingkat masyarakat. Hal ini dapat dilihat sebagai salah satu upaya mendorong inklusivitas, dimana program menyasar manfaat untuk masyarakat yang lebih luas, khususnya kelompok miskin, meskipun secara tidak langsung.</p>

<sup>11</sup> Dasa wisma (literally 'ten households') is a group of mothers from 10–20 neighbouring families that are formed to facilitate a program.

## Lampiran C:

# Daftar Pustaka

- Ajeng Septami, G., & Gede karma Wisana, I.D. (2018). The effects of siblings composition on the children's intellectual performance in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 126. <https://doi.org/10.2991/iciied-17.2018.26>.
- Asian Development Bank (ADB). (2018). *Republic of Indonesia: Building Inclusive Social Assistance*. Technical Assistance Report. October.
- Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG), Monash University, & DFAT. (2017). *Disability in Indonesia: What can we learn from the data?*
- Badan Pusat Statistik (BPS) [Statistics Indonesia]. (2013). *The selected districts of Papua Province multiple indicator cluster survey (MICS) 2011: Monitoring the situation of children and women*. <http://www.childinfo.org>.
- Badan Pusat Statistik (BPS) [Statistics Indonesia]. (2019). *Statistik Indonesia 2019* [Statistics of Indonesia, 2019]. <https://www.bps.go.id/publication/2019/07/04/daac1ba-18cae1e90706ee58a/statistik-indonesia-2019.html>.
- Badan Pusat Statistik (BPS) [Statistics Indonesia]. (2020). *[IPG] Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut provinsi, 2010–2019* [Gender Development Index based on province, 2010–2019]. <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1569/-ipg-indeks-pembangunan-gen-der-ipg-menurut-provinsi-2010-2019.html>.
- BANGGA Papua. (2017). *BANGGA Papua: Social protection for Papua's children and older people. Program Document*. DFAT (MAHKOTA and KOMPAK).
- Bappenas, GIZ, & Global Concern Consulting. (2016). *Studi Awal Perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Papua dan Papua Barat*.
- Bank Indonesia. (2016). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Papua: Triwulan IV 2015* [Regional Economic and Financial Studies of Papua Province: Quarter IV 2015], 1(4). Jayapura: Bank Indonesia.
- Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman, L., Sturge, G., Barca, V., Schmidt, T., & Pellerano, L. (2016). *Cash transfers: what does the evidence say? A rigorous review of impacts and the role of design and implementation features*. ODI. <https://www.odi.org/publications/10505-cash-transfers-what-does-evidence-say-rigorous-review-impacts-and-role-design-and-implementation>.
- Bennet, L. (2002). *Using empowerment and social inclusion for pro-poor growth: A theory of social change. Background paper for the Social Development Sector Strategy*. World Bank.

- Buller, A.M., Peterman, A., Ranganathan, M., Bleile, A., Hidrobo, M., & Heise, L. (2018). A mixed-method review of cash transfers and intimate partner violence in low- and middle-income countries. *The World Bank Research Observer*, 33(2), August 2018, 218–258. <https://doi.org/10.1093/wbro/lky002>.
- Clark, M.S., & Mills, J.R. (2012). A theory of communal (and exchange) relationships. In P.A.M. Van Lange, A.W. Kruglanski, & E.T. Higgins (Eds.), *Handbook of theories of social psychology* (pp. 232–250). London: SAGE Publications.
- Hanley, C. & Irfani, D. (2020). *BANGGA Papua Process Evaluation: Final report*. DFAT (Whitelum group), unpublished.
- Hatton, T.J., Sparrow, R., Suryadarma, D., & van der Eng, P. (2018). Fertility and the health of children in Indonesia. *Economics and Human Biology*, 28(December), 67–78. <https://doi.org/10.1016/j.ehb.2017.12.002>.
- Jain, V., & Saraf, S. (2013). Empowering the poor with right to information and library services. *Library Review*, 62(1/2). <https://doi.org/10.1108/00242531311328159>.
- Kanbura, R. & Rauniyarb, G. (2010). Conceptualizing inclusive development: With applications to rural infrastructure and development assistance. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 15(4), 437–454.
- Kementerian Kesehatan [Ministry of Health]. (2017). *Profil Kesehatan Indonesia [Indonesian Health Profile]*. <https://www.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatanindonesia/Profil-Kesehatan-Indonesia-tahun-2017.pdf>.
- KOMPAK. (2018). *KOMPAK Gender Equality and Social Inclusion Strategy 2018–2022*. DFAT.
- MAHKOTA. (2019). *BANGGA Papua cash use monitoring*. Jakarta: DFAT (MAHKOTA), unpublished.
- PUSKAPA UI, KOMPAK, & DFAT. (2020). *Menyambung Rantai Inklusi: Memahami Kerentanan dalam Sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia*. Unpublished document. Jakarta: DFAT (KOMPAK).
- Stecklov, G., Winters, P.C., Todd, J.E., & Regalia, F. (2006). *Demographic externalities from poverty programs in developing countries: Experimental evidence from Latin America*. Department of Economics Working Paper Series No. 2006-1. American University. [https://www.researchgate.net/publication/4903590\\_Demographic\\_Externalities\\_from\\_Poverty\\_Programs\\_in\\_Developing\\_Countries\\_Experimental\\_Evidence\\_from\\_Latin\\_America](https://www.researchgate.net/publication/4903590_Demographic_Externalities_from_Poverty_Programs_in_Developing_Countries_Experimental_Evidence_from_Latin_America).
- United Nations Development Programme (UNDP). (2016). *Study on women's and men's health and life experiences in Papua, Indonesia: UNDP report*. UNDP, BPS, USAID, Rifka Annisa.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2009). *Freedom of expression, access to information and empowerment of people: World Press Freedom Day 2008*. Paris: UNESCO.
- Yoshikawa, L. (2015). *Integrating cash transfers into gender-based violence programs in Jordan: Benefits, risks, and challenges*. International Rescue Committee (IRC) & the UN Refugee Agency (UNHCR).



# KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan  
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*

Jalan Diponegoro No. 72  
Jakarta 10320 Indonesia  
T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090  
E: [info@kompak.or.id](mailto:info@kompak.or.id)  
[www.kompak.or.id](http://www.kompak.or.id)

ISBN 978-623-6080-32-0 (PDF)



9 786236 080320